



REDAKSI

Pengarah: Mira Tayyiba

Pemimpin Redaksi: Rhina Anita

Wakil Pemimpin Redaksi: Daoni Diani Hutabarat

Redaktur Pelaksana: Helmi Fajar Andrianto

Wakil Redaktur Pelaksana:

Redaktur: M. Taufiq Hidayat Verawati Annisa Bonita P.

Reporter: Yusuf Ahmad Irso Kubangun Meita Pusparini Desideramus Bitan Emild Kadju

Fotografer: Agus Yudi Harsono Doni Paulus Sumule Sri Indrati Noviarsari Indra Kusuma

Desain & Layout: Adista Winda Rizka Rahma Aulia Indroputri Dhenty Febrina Sahara Annas Yudistira Saputra

Produksi: Fahmie Trihatin J.

Alamat Redaksi:

Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat

Surat dari MMB9

Menyongsong Masa Depan dengan Investasi yang Bijak

Di era globalisasi yang semakin dinamis, dimana ekonomi digital menjadi titik sentral pertumbuhan, kita dihadapkan pada peluang dan tantangan yang belum pernah ada sebelumnya. Ekonomi digital menjadi sebuah kekuatan yang tak bisa diabaikan.

Keberhasilan Indonesia menggapai peluang ini tergantung pada bagaimana kita memahami dan berinvestasi dalam ekonomi digital. Ada berbagai aspek yang berperan penting dalam mewujudkan visi ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Tak bisa dipungkiri, startup telah menjadi motor penggerak ekonomi digital di banyak negara, termasuk Indonesia. menvaksikan bagaimana startup lokal telah tumbuh dan menunjukkan potensinya tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga global. Namun, pertumbuhan yang berkelanjutan memerlukan lebih dari sekedar ide yang brilian, dibutuhkan investasi yang tepat dan bijak.

Pada 2022, Indonesia menempati posisi sebagai negara Asia Tenggara dengan ekonomi digital terbesar, sebuah capaian yang luar biasa. Berdasarkan hasil survei dari Google, Temasek, dan Bain & Company, proyeksi ekonomi digital mencapai US\$ 315 miliar pada 2030, kita melihat masa depan yang sangat



Untuk menunjang ekosistem digital di Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah-langkah proaktif, seperti membangun infrastruktur digital di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), membangun pusat data nasional, dan meningkatkan literasi digital masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen dalam pembangunan ekosistem digital terutama di bidang *startup*, pemerintah meluncurkan berbagai program pendukung seperti Sekolah Beta, Gerakan 1000 Startup, dan HUB.ID untuk mendukung generasi muda agar mampu menciptakan solusi digital yang inovatif untuk permasalahan kita

Investasi pada *startup* bukan hanya soal modal finansial, tetapi juga tentang pembinaan, pendampingan, dan pembukaan akses ke pasar global. Misalnya, partisipasi dalam Hannover Messe 2023, di mana Indonesia menjadi *Official Country Partner*, memberikan kesempatan bagi *startup* kita untuk berjejaring dengan investor kelas dunia, menunjukkan inovasi, dan menarik investasi yang strategis.

Investasi ini, ketika dikelola dengan bijak, akan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Ini akan membantu startup kita dalam melakukan akselerasi bisnis, memperluas jangkauan, dan menyelesaikan permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Lebih dari itu, investasi ini juga akan mendorong inovasi dan kompetitivitas yang lebih tinggi di tingkat global.

Tantangan kita adalah bagaimana memastikan bahwa investasi ini mengarah pada pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak luas.

Menyongsong masa depan berarti bekerja bersama untuk memastikan bahwa setiap investasi, setiap inisiatif, dan setiap langkah yang kita ambil hari ini membawa kita lebih dekat dengan Indonesia yang lebih inovatif, kompetitif, dan inklusif.

Mari kita bersama-sama membangun masa depan yang cerah dengan investasi yang bijak, menopang startup kita dalam perjalanan mereka, dan mendorong ekonomi digital Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi.

Selamat membaca!

"

Tantangan kita adalah bagaimana memastikan bahwa investasi ini mengarah pada pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak luas.





Hadiri Pembukaan Hannover Messe 2023, Presiden Tegaskan Indonesia Terbuka untuk Investasi

Presiden menyebut bahwa Indonesia juga menargetkan 23 persen sumber energi yang dihasilkan berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT) pada 2025.



Presiden Joko Widodo menyebut bahwa Indonesia sangat terbuka untuk investasi dan kerja sama, di antaranya dalam hilirasi industri dan ekonomi hijau. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya ketika menghadiri upacara pembukaan Hannover Messe 2023 di Hannover Congress Centrum, Hannover, Jerman, pada Minggu, 16 April 2023.

"Indonesia tidak sedang menutup diri, justru kami sangat terbuka untuk investasi dan kerja sama dalam membangun industri hilir di Indonesia," ucap Presiden.

Dalam membangun industri tersebut, Presiden menilai bahwa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar, terlihat dari proyeksi nilai investasi dalam peta jalan hilirisasi Indonesia yang mencapai US\$545,3 miliar.

"Sampai tahun 2040 ada 21 komoditas dalam peta jalan hilirisasi yang diproyeksikan mencapai nilai investasi US\$545,3 *billion*, ini peluang yang sangat besar, yang saling menguntungkan," kata Presiden.

Selain itu, Kepala Negara juga menekankan komitmen Indonesia dalam menjaga keberlangsungan lingkungan yang terlihat dari sejumlah aksi nyata yang telah dilakukan dalam memperbaiki lingkungan serta upaya melaksanakan transisi energi.

"Laju deforestasi turun signifikan dan terendah 20 tahun terakhir, kebakaran hutan turun 88 persen, rehabilitasi hutan 600.000 Ha hutan mangrove yang akan selesai direhabilitasi di tahun 2024, terluas di dunia, juga dibangun 30.000 Ha kawasan industri hijau," tuturnya.

Di samping itu, Presiden menyebut bahwa Indonesia juga menargetkan 23 persen sumber energi yang dihasilkan berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT) pada 2025, serta berencana untuk menutup seluruh pembangkit listrik tenaga uap batu bara di tahun 2050.

"Indonesia juga ingin memastikan bahwa transisi energi menghasilkan energi yang terjangkau bagi masyarakat kita," lanjutnya.

https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/hadiripembukaan-hannover-messe-2023-presiden-tegaskanindonesia-terbuka-untuk-investasi/





Presiden Jokowi Dorong Optimalisasi Kegiatan

Deradikalisasi

Selain itu, dalam keterangannya, Rycko juga menjelaskan bahwa pihaknya akan berupaya untuk bersinergi dengan lembaga pemerintah lainnya dalam menanggulangi terorisme di Tanah Air.



Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rycko Amelza Dahniel untuk melakukan kegiatan deradikalisasi secara optimal. Kegiatan tersebut dimaksudkan utamanya kepada masyarakat yang pernah terlibat dalam tindakan radikalisme dan terorisme.

"Terutama kepada saudara-saudara kita yang pernah tersesat dan terlibat dalam masalah hukum dengan kasus-kasus radikalisme dan terorisme. Kita tentunya akan menggunakan berbagai upaya pendekatan secara preventif, secara persuasif," ucap Rycko saat menyampaikan keterangannya kepada awak media usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 3 April 2023.

Selain itu, dalam keterangannya, Rycko juga menjelaskan bahwa pihaknya akan berupaya untuk bersinergi dengan lembaga pemerintah lainnya dalam menanggulangi terorisme di Tanah Air. Menurut Rycko, BNPT akan melakukan sejumlah kerja sama baik di dalam maupun luar negeri dalam melakukan upaya pencegahan tindakan radikalisme dan terorisme.

"Kita akan melakukan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri terutamanya dengan melakukan upaya-upaya pencegahan, pencegahan dengan menggunakan sentuhan hati, pencegahan yang lebih mengedepankan upaya-upaya dalam bidang edukasi, pendidikan dan kesejahteraan," tambahnya.

"Penegakan hukum akan ditempatkan sebagai ultimum remedium, pilihan terakhir dalam melakukan upaya penanggulangan ideologi dan terorisme," lanjutnya.

https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-dorong-optimalisasi-kegiatan-deradikalisasi/





Silaturahmi Wapres dan Ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin dengan Presiden dan Ibu Negara secara Virtual

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin dan Ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin bersaturahmi dengan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara secara daring dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Sabtu (22/04/2023).

Setelah melaksanakan salat Idulfitri 1444 H di Masjid Istiqlal, Wapres kembali ke Kediaman Resmi Wapres dan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga inti serta para perangkat melekat. Selain itu, Wapres beserta Ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin juga melakukan silaturahmi secara virtual dengan Presiden dan Ibu Negara yang pada kesempatan tersebut berada di Solo.

"Assalamualaikum Pak Presiden, Minal Aidin Wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin, Pak Presiden," tutur Wapres. "Assalamualaikum Ibu, saya juga menghaturkan selamat hari raya Idulfitri, mohon maaf lahir batin," sambung Ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin.

Salam tersebut pun disambut dengan ucapan yang sama oleh Presiden dan Ibu Negara.

"Pak Wapres beserta Ibu, Selamat Idulfitri. Mohon maaf lahir dan batin," ungkap Presiden.

"Iya, nanti habis Dzuhur nanti ke Banten, pak. Pulang kampung," urai Wapres menceritakan agendanya. Presiden pun membalas bahwa ia akan melakukan silaturahmi dengan keluarga di solo dan melanjutkan perjalanan ke Labuan Bajo untuk memeriksa secara langsung lokasi pelaksanaan KTT ASEAN yang akan berlangsung tidak lama lagi.

https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presidenjokowi-dorong-optimalisasi-kegiatan-deradikalisasi/



Resensi Novel

Circe

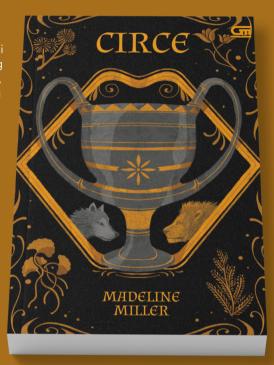
Penggemar mitologi Yunani pasti tidak asing mendengar nama Circe, seorang penyihir yang hanya sering ditampilkan sebagai figuran dalam novel-novel mitologi Yunani lainnya. Kali ini, Madeline Miller membawakan secara khusus cerita tentang seorang penyihir jenius yang diasingkan oleh dewa-dewa.

Sesuai dengan judulnya, novel berjumlah 538 halaman ini akan menyuguhkan kisah hidup Circe, mulai dari rahasia kelahirannya hingga akhir hidupnya.

Diceritakan dalam novel tersebut, Circe merupakan anak dari Dewa Matahari, Helios, dan seorang peri air atau *naiad* bernama Perse.

Sayangnya, Circe lahir dalam keadaan tidak memiliki kemampuan apapun. Ia tidak memiliki wibawa serta kekuasaan seperti ayahnya dan tidak memiliki kecantikan yang mematikan seperti ibunya. Namun, ternyata ia memiliki kemampuan tersembunyi yakni, menjinakkan berbagai monster dan meramu berbagai macam ramuan ajaib yang bisa merubah dewa menjadi monster

Suatu hari, Circe melakukan kesalahan, karena kecemburuannya ia merubah peri alam atau nimfa bernama Scylla menjadi seekor monster berkepala enam yang haus darah. Sadar akan kesalahannya, Circe pun mengaku pada sang ayah, Helios. Masalah bertambah rumit Ketika kemampuan Circe sampai di telinga Zeus.



Akibatnya, Circe diasingkan ke sebuah pulau bernama Aiaia. Hukuman tersebut juga dimaksudkan Zeus untuk membatasi kemampuan Circe agar tidak membahayakan dewa-dewa Olympus.

Tentu saja cobaan Circe belum selesai sampai situ, tiba-tiba ia dihadapkan pilihan untuk memilih melindungi orangorang tersayangnya atau berada di pihak para dewa. Akankah Circe memilih tawaran dari dewadewa Olympus? Atau

justru ia akan mati-matian melawan para dewa demi melindungi orang-orang terkasihnya?

Setelah membaca cuplikan kisah hidup Circe di atas, pasti membuat kalian penasaran bagaimana kelanjutan nasib Circe dan putranya. Apalagi, dalam novel ini sosok Circe digambarkan sebagai tokoh perempuan yang kuat dan tidak terlalu bergantung pada laki-laki atau mengharapkan bantuan dari siapapun.

Madeline Miller pun cukup cerdasa dalam memilih gaya bahasa. Ia memilih kosakata yang puitis, namun mudah dimengerti.

Nah, itu dia ulasan dari novel Circe mahakarya dari Madeline Miller. Buat kamu yang sudah tidak sabar untuk menyimak perjuangan hidup Circe, kamu bisa membacanya melalui aplikasi Ruang Buku Kominfo.





KOLEKSI BUKU BARU PERPUSTAKAAN KOMINFO



Selain judul buku diatas, ada juga terbitan dari pengarang: Tere Liye, Ika Natassa, Agatha Christie, Almira Bastari, Leila S. Chudori, Keigo Higashino, Matt Haig, Dee Lestari, C.S Lewis, Rick Riordan, Enid Blyton, Maman Suherman, Valerie Patkar, dan lainnya

Layanan Perpustakaan

Senin – Kamis Jam 09.00-15.00

Jumat Jam 09.00-11.30

Jam 13.30-15.30

Akses katalog di

http://perpustakaan.kominfo.go.id/

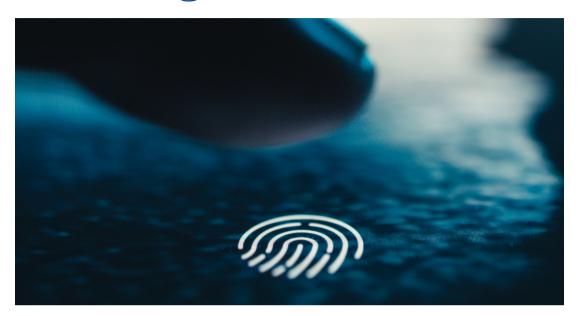
(hanya bisa diakses dari jaringan internal kominfo)

Perpustakaan Kementerian Kominfo

Gedung Belakang Lt 1 Jl. Medan Merdeka Barat No 9, Jakarta Pusat



Mengenal UU PDP



Halo Sobatkom!

Sudah tahu belum kalau Indonesia memiliki Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi? Undang-Undang ini dibuat untuk melindungi data pribadi warga negara Indonesia.

Masih ingat skandal data terbesar pada tahun 2018 tentang *Facebook - Cambridge Analytica?* Di mana jutaan data pribadi pengguna Facebook digunakan untuk membuat profil psikologis yang dimanfaatkan dalam kampanye politik untuk mempengaruhi pandangan pemegang hak pilih.

Kasus ini merupakan salah satu pemicu kesadaran global atas pentingnya privasi dan etika penggunaan data pribadi.

Nah, UU PDP ini merupakan Undang-Undang yang memberikan payung hukum yang kuat dan jelas untuk pengelolaan dan pelindungan data pribadi warga negara



Negara-negara di Eropa menerapkan General Data Protection Regulation (GDPR), yang memberikan kontrol lebih besar pada individu atas data pribadi dan menerapkan pedoman ketat tentang bagaimana data ini digunakan.



Apa Sih Undang-Undang PDP?

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada 20 September 2022 mengatur aspek-aspek fundamental dalam pelindungan data pribadi. Secara spesifik undang-undang ini mencakup hak-hak yang melekat pada setiap individu terkait dengan data pribadi mereka, aturan tentang bagaimana data pribadi harus diproses, kewajiban yang dimiliki oleh pengendali data pribadi, dan penerapan larangan dan sanksi terkait.

Berdasarkan survei yang dilakukan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika pada tahun 2021, sebanyak 28.7% masyarakat mengalami penyalahgunaan data pribadi, sistem pelindungan data dinilai cukup baik namun belum memadai, hanya 30% perusahaan memiliki sertifikat manajemen informasi dan hanya 23% perusahaan memiliki fungsi *Data Protection Officer* (DPO).



Selain itu di era *big data* dan ekonomi digital seperti saat ini data pribadi menjadi aset (komoditas) yang bernilai tinggi. Maraknya serangan siber dan kebocoran data di era digital merupakan alasan pentingnya UU PDP ini karena data pribadi merupakan hak yang melekat pada setiap individu yang harus dilindungi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Oleh karena itu pelindungan data pribadi bukan hanya tugas setiap individu saja. Pemerintah hadir dengan membuat UU PDP sebagai payung hukum yang kuat dan jelas untuk tata kelola dan pelindungan data pribadi warga negara.



Manfaat Undang Undang PDP

UU PDP menjadi kerangka kerja yang kuat untuk melindungi data pribadi setiap individu karena tidak hanya menciptakan kewajiban hukum untuk pengendali data melainkan juga memberikan hak-hak yang melekat pada setiap individu.

Keberadaan UU PDP ini memberikan pelindungan hak individu di mana setiap individu memiliki kontrol dan akses terhadap data pribadi mereka. Individu memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data digunakan dan hak untuk mengakses, mengubah, atau menghapus data serta hak untuk menentang pemrosesan yang tidak sah.

UU PDP memberikan kesetaraan dan keseimbangan pemilik data pribadi dengan pengelola data pribadi di mata hukum. Ini akan mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi di seluruh pengelola data baik di sektor privat, pemerintahan hingga swasta agar menghormati hak pemilik data pribadi.

Selain itu keberadaan undang-undang ini juga akan mendorong peningkatan standar di industri dengan adanya standar bagaimana data pribadi harus dikumpulkan, disimpan, diproses dan dibagikan. Sehingga menciptakan kewajiban hukum bagi para pengelola data.

Hal ini bisa membantu mencegah penyalahgunaan data pribadi dan pelanggaran keamanan data. Tentunya dengan pedoman yang harus diikuti dan sanksi untuk setiap pelanggaran. Dengan aturan yang jelas dan tegas UU ini bisa membantu meningkatkan kepercayaan publik dalam melakukan transaksi secara digital karena tidak perlu khawatir lagi dengan kebocoran data pribadi yang sudah dilindungi oleh Undang-Undang.

Tidak hanya itu, dalam pengembangan teknologi yang mengedepankan penggunaan perspektif pelindungan data pribadi akan mendorong inovasi yang beretika, bertanggung jawab dan menghormati hak asasi manusia. Undang-Undang ini juga akan mendorong masyarakat untuk menyadari dan menjaga data pribadinya serta menghormati hak pelindungan data pribadi orang lain.

Apalagi ekosistem digital yang tidak mengenal batas akan membantu Indonesia untuk berpartisipasi dalam ekonomi global dengan cara yang sah dan etis. Hal ini juga akan mempengaruhi kepercayaan dunia internasional terhadap kepemimpinan Indonesia.





Meskipun begitu tetap dibutuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi data pribadi untuk mewujudkan lingkungan digital yang aman. Oleh karena itu masyarakat diharapkan memahami hak dan tanggung jawab data pribadi yang melekat pada diri mereka.

Masyarakat juga perlu membangun budaya di mana privasi dihargai dan dilindungi, baik dalam interaksi pribadi maupun bisnis, sehingga dapat mendorong pelindungan data pribadi yang efektif.

Karena pada dasarnya kesadaran masyarakat atas pelindungan data pribadi tidak hanya mengetahui tentang hukum dan peraturannya, tetapi tentang membangun pemahaman tentang pentingnya privasi di dunia digital.

Undang-Undang ini juga akan mendorong masyarakat untuk menyadari dan menjaga data pribadinya serta menghormati hak pelindungan data pribadi orang lain

Mahkamah Konstitusi juga menerima dua permohonan uji materi atas UU PDP. Ini merupakan salah satu bentuk keterlibatan masyarakat terhadap penyusunan undangundang yang dapat berdampak positif terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan yang sedang dilaksanakan untuk melaksanakan UU PDP.

Bagaimana menurut SobatKom? Mau mempelajari lebih lanjut tentang UU PDP ini? Sobatkom bisa mengunduhnya melalui tautan:





https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176837/ Salinan UU Nomor 27 Tahun 2022.pdf





Bekerja dengan AI Chat GPT

Kecerdasan buatan / Al (Artificial Intelligence) telah membuka babak baru dalam sejarah teknologi. Tanpa disadari kini Al hadir begitu dekat dengan kehidupan, mulai dari membantu mencari rute tercepat dalam perjalanan, memberikan rekomendasi lagu sesuai selera, hingga menghasilkan analisis data kompleks dalam hitungan detik.

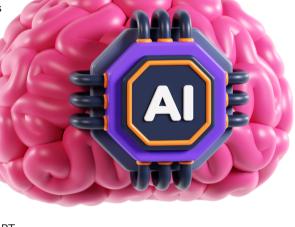
Chat GPT (Generative Pre-training Transformer) yang dikembangkan oleh OpenAl salah satunya. Teknologi Al berbasis teks ini memiliki kemampuan untuk merespon pertanyaan dan perintah sesuai konteks layaknya seorang manusia.

Chat GPT perlu dilatih untuk bisa memproses berbagai perintah atau yang dikenal dengan istilah *prompt* oleh *user.* Dalam prosesnya, Chat GPT ini akan dilatih menggunakan metode *Large Language Model* (LLM). Di mana program ini akan mempelajari sejumlah besar data untuk memprediksi kata.

Setelah belajar melalui proses LLM, Chat GPT juga menjalani latihan menggunakan Reinforcement Learning with Human Feedback (RLHF). Metode ini menggunakan timbal balik dari manusia untuk melatih kecerdasannya, sehingga Chat GPT bisa memahami respon yang diinginkan manusia.

Ini yang membuat Chat GPT bisa memahami konteks perintah maupun pertanyaan user sehingga bisa memberikan jawaban sesuai dengan yang diinginkan oleh manusia.

Ada banyak jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh Chat GPT dengan singkat seperti menyelesaikan soal matematika, membuat kerangka tulisan, menuliskan kode pemrograman hingga membuat pantun.



dilakukan oleh Chat GPT dengan singkat seperti menyelesaikan soal matematika, membuat kerangka tulisan, menuliskan kode pemrograman hingga membuat pantun



Penggunaan Chat GPT

Chat GPT bisa membantu dalam banyak hal. Berikut beberapa hal yang bisa dibantu oleh Chat GPT:

Mendapatkan Informasi

Chat GPT bisa memberikan informasi relevan tentang berbagai macam topik. Meski begitu, sebagai pengguna diharapkan untuk tetap melakukan *fact checking* untuk memastikan bahwa informasi tersebut benar, karena program ini hanya mengetahui peristiwa sebelum 21 September 2021.

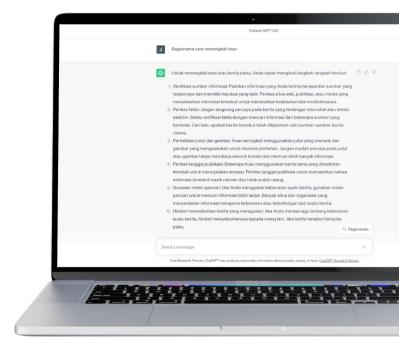
Hiburan

Chat GPT bisa memberikan hiburan dalam berbagai bentuk seperti lelucon, cerita pendek, puisi dan permainan. Selain itu program ini juga bisa memberikan rekomendasi film, musik, dan buku.

Kelebihan Chat GPT

Chat GPT memiliki beberapa kelebihan yang bisa membantu pekerjaan, seperti:

- Menjawab berbagai pertanyaan yang relevan dalam waktu singkat
- Menyajikan jawaban yang mudah dipahami oleh manusia
- Dapat diakses dengan mudah melalui web browser
- Bisa beradaptasi dengan perintah pengguna untuk memahami konteks yang di-input



Bantuan Teknis

Chat GPT bisa memberikan bantuan teknis seperti membuatkan kode dalam bahasa pemrograman tertentu, me-review kode pemrograman, hingga memberikan solusi untuk kode pemrograman.

kekurangan Chat GPT

Selain itu Chat GPT juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipahami oleh pengguna, seperti:

- Kebenaran atas jawaban Chat GPT tidak mutlak. Jika ketersediaan data dari pertanyaan yang diajukan oleh pengguna terbatas, jawaban bisa saja kurang akurat atau salah kaprah
- Informasi Outdated. Chat GPT hanya bisa mengakses informasi yang diterbitkan sebelum 21 September 2021 sehingga program ini belum bisa memberikan jawaban akurat untuk berbagai peristiwa yang terjadi setelah tanggal 21 September 2021.





Menarik investor internasional melalui acara pameran teknologi terbesar di dunia,

Hannover Messe

"

Pameran Hannover Messe 2023 ini merupakan peluang besar untuk mewujudkan visi Indonesia masuk dalam 10 besar Negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030

Di tahun 2022, Indonesia berhasil menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Berdasarkan laporan Google, Temasek, dan Bain & Company, Indonesia memiliki *Gross Merchandise Value* (GMV) ekonomi digital sebesar US\$77 miliar atau sekitar Rp1.198,3 triliun. Sedangkan GMV ekonomi digital di Asia Tenggara sebesar US\$194 miliar. 39.69% ekonomi digital di Asia Tenggara berasal dari Indonesia.

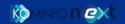
Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia diprediksi akan terus naik dengan *compounded* annual growth rate (CAGR) 19%, hingga mencapai kisaran US\$220 miliar - US\$236 miliar pada 2030.

Pertumbuhan ekonomi digital ini tentu tidak bisa lepas dari munculnya berbagai *startup* di Indonesia yang menghasilkan produk dan layanan baru untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan pasar.

Akses permodalan merupakan salah satu tantangan yang dihadapi banyak *startup* di Indonesia. Sehingga banyak *startup* dengan pertumbuhan yang tidak signifikan bahkan cenderung stagnan.

Meski begitu ada sekitar 13 startup asal Indonesia yang berhasil mendapatkan gelar unicorn yaitu startup yang memiliki valuasi melampaui US\$1 miliar atau sekitar 14,3 triliun. Unicorn ini merupakan perusahaan startup yang turut berkontribusi menggerakkan ekonomi digital di Indonesia. Beberapa startup tersebut di antaranya ada Gojek, Tokopedia, Traveloka, Ajaib, Bukalapak, OVO, Kopi Kenangan, Xendit, Tiket.com, J&T, Kredivo, Dana, dan Blibli.

Perolehan gelar *unicorn* bagi *startup* Indonesia tentu tidak terlepas dari kontribusi para investor yang menanamkan investasi, mengingat mereka melihat potensi besar dalam perkembangan *startup* tersebut.



Hal ini memungkinkan *startup* untuk dengan cepat mengembangkan produk atau layanan guna memperluas pasar.

Selain mendapatkan suntikan dana untuk ekspansi, adanya investasi juga membuat *startup* mendapatkan akses ke berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan seperti jejaring, pengetahuan dan peluang baru.

Di tahun 2023, Indonesia terpilih kembali menjadi *Official Country Partner Hannover Messe* untuk ketiga kalinya. Hannover Messe merupakan pameran teknologi terbesar di dunia yang berlangsung di Hannover, Jerman. Sebelumnya Indonesia juga pernah menjadi *Official Partner Country* pada tahun 1995 dan 2021.

uang. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo, Usman Kansong, menyatakan ada target investasi yang harus dicapai dalam *event* seperti itu.

"Jadi itu kalau ada *event* internasional baik di dalam negeri maupun di luar negeri itu orang biasanya mengatakan menghambur-hamburkan uang saja. Nah ini kita komunikasikan tidak, (bahwa) kita tidak menghambur-hamburkan uang (karena ada target investasi yang masuk ke Indonesia)," jelasnya di Jakarta Pusat, Selasa (04/04/2023).

Dirjen IKP Kominfo mencontohkan keikutsertaan dalam Hannover Messe 2023 di Jerman. Indonesia menjadi negara di Asia Tenggara pertama yang menjadi mitra resmi pertama *event* pameran industri internasional tersebut.



Partisipasi Indonesia sebagai Official Partner Country Hannover Messe 2023 tidak hanya penting untuk ajang branding bagi Indonesia, tetapi juga mendorong peningkatan kapabilitas manufaktur Indonesia dan pembangunan infrastruktur digital. Di samping itu, dapat memperluas dan menjalin kemitraan baru terkait industri 4.0 serta mampu mempromosikan investasi dan ekspor sektor industri nasional di kawasan Eropa.

Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai *event* internasional di luar negeri seperti Hannover Messe 2023 bukan pemborosan atau menghamburkan-hamburkan Indonesia terpilih kembali menjadi Official Country Partner Hannover Messe untuk ketiga kalinya





Dirjen IKP Kominfo mencontohkan keikutsertaan dalam Hannover Messe 2023 di Jerman. Indonesia menjadi negara di Asia Tenggara pertama yang menjadi mitra resmi pertama event pameran industri internasional tersebut.

Menurutnya, keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam pameran industri bergengsi dunia itu diharapkan bisa menarik minat para investor raksasa internasional untuk menanamkan modalnya di dalam negeri.

Dirjen IKP Kominfo mencontohkan keikutsertaan dalam Hannover Messe 2023 di Jerman. Indonesia menjadi negara di Asia Tenggara pertama yang menjadi mitra resmi pertama *event* pameran industri internasional tersebut.

Menurutnya, keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam pameran industri bergengsi dunia itu diharapkan bisa menarik minat para investor raksasa internasional untuk menanamkan modalnya di dalam negeri.

"Memang ada anggaran yang kita keluarkan, tapi targetnya yang harus kita dapatkan berupa investasi itu lebih tinggi daripada *cost* yang kita keluarkan," tegasnya.

Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam Hannover Messe 2023 diharapkan bisa mencetak banyak kerja sama dengan perusahaan atau investor asing dalam berbagai proyek di dalam negeri, sehingga bisa membuka banyak lapangan pekerjaan di berbagai daerah.



"Kalau lapangan kerja tercipta maka daya beli masyarakat ini akan meningkat dan secara langsung ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita," ujar Dirjen Usman Kansong.

Kementerian Kominfo telah mengimplementasikan sejumlah strategi komunikasi publik agar masyarakat memahami pentingnya partisipasi pemerintah dalam berbagai *event* internasional, khususnya Hannover Messe 2023.

"Kita ingin disampaikan kepada publik bahwa keikutsertaan (Indonesia) di Hannover Messe dan event internasional lainnya maupun ketika kita menyelenggarakan *event* internasional di dalam negeri ini bermanfaat buat masyarakat juga," tandas Dirjen IKP Kementerian Kominfo.



Dirjen Ketahanan, Perwilayahan & Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian RI, Eko S.A. Cahyanto, mengatakan, bahwa posisi ini sangat strategis bagi Indonesia. Karena kepercayaan dari penyelenggara dan restu dari Jerman, akan menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk memperkenalkan kemampuan industri dalam penguasaan dan potensi sebagai supply chain untuk industri.

"Selain memperkenalkan industri, kita tentunya juga akan mendorong kerja sama dalam rangka mendapatkan teknologi terkini, meningkatkan SDM dan mendorong investasi," ujarnya dalam Dialog FMB9 yang mengangkat tema 'Industri Masa Depan Berwawasan Lingkungan Hannover Messe 2023', di Media Center Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin (27/03/2023).

"Pameran Hannover Messe 2023 ini merupakan peluang besar untuk mewujudkan visi Indonesia masuk dalam 10 besar Negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030. Partisipasi Indonesia sebagai Official Partner Country Hannover Messe 2023 tidak hanya penting untuk ajang branding bagi Indonesia, tetapi juga mendorong peningkatan kapabilitas manufaktur Indonesia dan pembangunan infrastruktur digital. Di samping itu, kami harapkan juga industri yang berpartisipasi dapat memperluas dan menjalin kemitraan baru terkait implementasi industri 4.0," ujar Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika.

Empat Target Utama

Hannover Messe mengusung topik yang berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2023, topik utama yang diangkat adalah:

- Al & Machine Learning:
 Bagaimana memanfaatkan Al dan
 Machine Learning untuk berbagai
 bidang industri
- Carbon-Neutral Production: Komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca

- Energy for Industry: Konsep
 Energy 4.0, yaitu integrasi antara
 teknologi digital dan jaringan
 energi dalam industri. Dalam
 lingkungan produksi, lantai kerja
 (shop floor) dan jaringan energi
 saling berkomunikasi, memberikan
 keuntungan seperti efisiensi energi
 yang lebih besar, fleksibilitas, dan
 efisiensi biaya
- Hydrogen & Fuel Cells: Solusi dan potensi penggunaan hidrogen dalam industri
- Industri 4.0: Revolusi industri keempat yang melibatkan digitalisasi proses industri

Dalam gelaran ini Indonesia menampilkan sejumlah teknologi industri 4.0 dan peluang investasi sektor industri. Indonesia juga mengadakan serangkaian kegiatan seperti pembukaan Paviliun Indonesia di Hannover Messe *Fairground* dengan luas area sekitar 3000 m², *Business Summit, Indonesia Country Night*, dan beberapa konferensi bertemakan industri.

Ada empat target utama Indonesia dalam keikutsertaannya di ajang Hannover Messe tahun ini:

- 01 Untuk mempresentasikan peta jalan Making Indonesia 4.0.
- 02 Untuk mempromosikan kerja sama industri.
- 03 Untuk mempromosikan investasi asing dan ekspor.
- 04 Untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Jerman sebagai tuan rumah.





"Making Indonesia 4.0" diperkenalkan sebagai peta jalan akselerasi implementasi teknologi industri 4.0 di Indonesia. Peta jalan ini mencakup keberlanjutan inklusif, bisnis startup dan pengembangan teknologi, serta untuk mendukung ekonomi sirkular. Selain itu, juga menyampaikan isu-isu yang terkait dalam mendukung program Making Indonesia 4.0.

Indonesia juga berkesempatan untuk menyampaikan kepada dunia internasional terutama para pelaku bisnis dan industri terkait kebijakan kemudahan investasi di Indonesia.

Kebijakan yang diberikan pemerintah mencakup kemudahan investasi, mulai dari tahap pendirian badan usaha, tahap memulai usaha atau legalitas konstruksi berbasis Klasifikasi Baku Lapangan

4.0 diperkenalkan sebagai peta jalan akselerasi implementasi teknologi industri 4.0 di Indonesia

Usaha Indonesia (KBLI) yang terdiri dari persyaratan dasar dan persyaratan sektoral, serta tahap pelaksanaan usaha atau legalitas operasional yang berbasis non-KBLI.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong mengatakan, melalui Hannover Messe, yang ingin disampaikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah tempat yang baik dan menjanjikan untuk berinvestasi sehingga banyak investor yang masuk ke Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat.

"Indonesia mengikuti Hannover Messe atau menjadi partner country untuk menarik investasi, menarik investor ke Indonesia. Kita berharap akan makin banyak investasi dari negara-negara lain, dari Jerman dan negara-negara Eropa khususnya," tegasnya di Hannover Fairground, Hannover, Jerman, Minggu (16/04/2023).

Indonesia menampilkan sebanyak 157 co-exhibitor, antara lain Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)/The Indonesian Palm Oil Estate Farm), Astra International Tbk, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan K/L, serta PT Domas Agrointi Prima dan PT Kaltim Parna, yang menyatakan dukungannya terhadap kepesertaan Indonesia pada Hannover Messe 2023, dengan harapan terbukanya peluang emas untuk potensi investasi.



Liputan Utama

Kementerian Kominfo melibatkan empat perusahaan startup binaan yaitu Imajin, Prieds, Amoda, dan Kecilin. Kementerian Kominfo berharap perusahaan *startup* ini dapat mengembangkan usahanya ke mancanegara.

Imajin merupakan sebuah *startup* yang bergerak di bidang *e-commerce* manufaktur di Indonesia yang memberikan layanan pembuatan *molds*, *dies*, *parts* hingga penyewaan mesin CNC.

Sedangkan Prieds merupakan penyedia sistem manajemen rantai pasok / supply chain yang meningkatkan efisiensi bisnis dan perangkat keras berbasis cloud (IoT) yang terintegrasi.

Amoda merupakan *startup* di bidang properti dengan produk ErgaPods dan ErgaBox yang mengadopsi konsep pre-fabrikasi dan bangunan modular. Hal ini membuat proses konstruksi menjadi lebih sederhana, efisien secara waktu, hemat biaya, fleksibel dan sedikit limbah. Dan Kecilin sebagai sebuah perusahaan startup SaaS (*Software-as-a-Service*) untuk layanan kompresi data.

"Selama ini masyarakat dunia, khususnya Eropa mengenal Indonesia sebagai negara tujuan wisata. Belum banyak yang mengetahui kemampuan Indonesia dalam memproduksi pesawat terbang, alat transportasi kereta api dan kapal laut, baik untuk keperluan transportasi maupun militer. Hal inilah yang mendorong Indonesia untuk berpartisipasi dalam Hannover Messe 2023 yang juga sejalan dengan visi Indonesia menjadi lima besar pemain industri di Asia pada tahun 2030," ujar Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Arif Havas Oegroseno, di Hannover, Jerman Kamis (13/04/2023).

"Guna lebih meningkatkan awareness masyarakat terhadap ajang Hannover Messe 2023, Pemerintah Indonesia juga telah melakukan beberapa kegiatan promosi dan publikasi baik yang dilakukan di dalam maupun luar negeri, bahkan jauh hari sebelum pelaksanaan pameran tersebut dilaksanakan," tuturnya.

Berbagai kegiatan promosi dan publikasi telah dilakukan untuk menggaungkan Indonesia Partner Country Hannover Messe 2023 kepada masyarakat baik yang di dalam maupun di luar negeri.







Sambutan Presiden Jokowi di Hannover Messe 2023

Presiden Joko Widodo dalam sambutan Pembukaan Hannover Messe 2023, di Hannover Congress Centrum, Hannover, Jerman, Minggu (16/04/2023) menegaskan bahwa Indonesia sangat terbuka untuk investasi dan kerja sama, di antaranya dalam hilirasi industri dan ekonomi hijau.

"Indonesia tidak sedang menutup diri, justru kami sangat terbuka untuk investasi dan kerja sama dalam membangun industri hilir di Indonesia," tandasnya dalam sambutan

Presiden menilai bahwa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar, terlihat dari proyeksi nilai investasi dalam peta jalan hilirisasi Indonesia yang mencapai US\$545,3 Miliar.

"Sampai tahun 2040 ada 21 komoditas dalam peta jalan hilirisasi yang diproyeksikan mencapai nilai investasi US\$545,3 *billion*, ini peluang yang sangat besar, yang saling menguntungkan," uiar Presiden.

Selain itu, Kepala Negara juga menekankan komitmen Indonesia dalam menjaga keberlangsungan lingkungan yang terlihat dari sejumlah aksi nyata yang telah dilakukan dalam memperbaiki lingkungan serta upaya melaksanakan transisi energi.

"Laju deforestasi turun signifikan dan terendah 20 tahun terakhir, kebakaran hutan turun 88 persen, rehabilitasi hutan 600 ribu hektare hutan mangrove yang akan selesai direhabilitasi di tahun 2024, terluas di dunia, juga dibangun 30 ribu hektare kawasan industri hijau," tuturnya.

Di samping itu, Presiden menyebut bahwa Indonesia juga menargetkan 23 persen sumber energi yang dihasilkan berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT) pada 2025, serta berencana untuk menutup seluruh pembangkit listrik tenaga uap batu bara di tahun 2050.

"Indonesia juga ingin memastikan bahwa transisi energi menghasilkan energi yang terjangkau bagi masyarakat kita," lanjutnya.







Pembukaan Paviliun Indonesia

Paviliun Indonesia di Hannover Messe 2023 dengan luas sekitar 3000 meter persegi menjadi ajang unjuk gigi inovasi teknologi industri dan memperluas jaringan bisnis oleh perusahaan-perusahaan Indonesia di kancah internasional.

Pembukaan Paviliun Indonesia di Hannover Messe Fairground pada tanggal 17 April 2023 ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Kanselir Jerman Olaf Scholz. "Selamat datang di Paviliun Indonesia. Paviliun yang didesain khusus mengikuti bentuk dari kapal tradisional Indonesia, kapal pinisi. Kami ingin menghadirkan semangat Indonesia dalam mengarungi tantangan masa depan," ujar Presiden dalam sambutannya.

Menurutnya, kapal pinisi tersebut juga memiliki navigator transformasi industri Indonesia yang dinamakan peta jalan "Making Indonesia 4.0".

"Saya mengajak Bapak, Ibu ke paviliun ini untuk melihat Indonesia sebagai land of opportunity dan sebagai hub manufaktur masa depan," ajaknya.



Lebih lanjut, kapal pinisi tersebut memiliki dua tiang layar utama yang mencerminkan fondasi transformasi Indonesia, hilirisasi industri, dan percepatan transisi energi bersih. Sementara, simbol lain berupa tujuh layar mencerminkan sektor prioritas yang dipromosikan di pameran tersebut.

"Sementara simbol tujuh layar mencerminkan sektor prioritas yang dipromosikan *co-exhibitor* (seperti) makanan, tekstil, otomotif, elektronik, kimia, alat kesehatan, dan farmasi," lanjutnya.

Presiden meyakini percepatan transformasi industri Indonesia akan berkontribusi bagi bangkitnya ekonomi kawasan dan global. Oleh karena itu, Presiden pun mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia melalui Paviliun Indonesia dalam Hannover Messe 2023.

"Maka dengan spirit of infinite journey, let's sail together and accelerate industrial transformation for a better world because invest in Indonesia means invest in a brighter future," tutur Presiden.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung keikutsertaan Indonesia dalam Hannover Messe 2023 untuk menarik investasi masuk ke Indonesia. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong menyatakan dukungan itu berupa sosialisasi dan fasilitasi bagi pelaku *startup* digital nasional.

"Kominfo terus mensosialisasikan kegiatan Indonesia Partner Country Hannover Messe 2023 kepada masyarakat agar mereka mengetahui manfaat yang didapatkan atas penyelenggaraan pameran ini," ungkapnya usai Pembukaan Paviliun Indonesia dalam Hannover Messe 2023 oleh Presiden Joko Widodo dan Kanselir Jerman Olaf Scholz.

Menurut Usman Kansong, Dirjen IKP Kementerian Kominfo, penyelenggaraan pameran ditargetkan dapat mengundang kehadiran investor Eropa di Indonesia yang dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Kita ingin menyampaikan kepada masyarakat, ada manfaat konkret yang akan diterima oleh masyarakat karena nanti yang menikmati lapangan pekerjaan adalah masyarakat," ujarnya.

Selain menarik investasi, Hannover Messe 2023 juga menjadi ajang pelaku *startup* untuk memamerkan produk dan inovasi. Dirjen Usman Kansong menjelaskan Kementerian Kominfo memfasilitasi beberapa perusahaan *startup* Indonesia untuk mengikuti Hannover Messe 2023.

"Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika melakukan pendampingan terhadap *startup* yang ikut serta membuka *booth* atau berpameran di Hannover Messe," tuturnya.

Dirjen IKP Kementerian Kominfo berharap perusahaan *startup* juga dapat menarik minat investor asing untuk berinvestasi. Menurutnya, potensi ekonomi digital Indonesia akan menjadi salah satu magnet penarik investor menanamkan modal di Indonesia.



Dirjen IKP Kementerian Kominfo berharap perusahaan startup juga dapat menarik minat investor asing untuk berinvestasi



Undang Investor Eropa ke HUB. ID

Dalam Seminar Venture Capital (VC) Engagement Eropa di Hall 2 Paviliun Indonesia, Kementerian Kominfo mengenalkan HUB.ID Summit 2023 sebagai pusat pertemuan bisnis antara startup digital, perusahaan modal ventura lokal dan global, industri, kementerian dan lembaga, BUMN, serta mitra bisnis.

Melalui seminar ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika memperkenalkan *startup* digital Indonesia kepada investor dan mitra bisnis, baik

we mate sustainable and intell dimate - for people, wheir app dimate - for people, wheir app dimate - for people, when a man hire Any live Any live

dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan tujuan untuk mengintegrasikan mereka dalam kompetisi bisnis global.

Dalam kegiatan VC Engagement ini, Venture Capital diundang untuk mendengar presentasi dari founder startup lokal yang memiliki pengalaman diinvestasi oleh VC global. Empat startup nasional yang dilibatkan dalam VC Engagement ini di antaranya Imajin, Prieds, Amoda dan Kecilin.









Selain itu, Kementerian Kominfo pun mengundang investor Eropa untuk menghadiri HUB.ID *Summit* 2023 pada tanggal 15 s.d. 16 September 2023 di Bali.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong menyatakan lewat HUB.ID *Summit* 2023, Pemerintah mendorong pertumbuhan dan peningkatan skala bisnis *startup*, sekaligus mempertemukan investor dengan pelaku *startup* digital nasional.

"Kita berharap para calon investor juga hadir di Bali untuk datang langsung, mengetahui secara langsung, bahkan mungkin bisa meninjau lokasi *startup* kita," ujarnya dalam rangkaian acara di Paviliun Indonesia Hannover Messe 2023, Hannover, Jerman, Selasa (18/04/2023).

Dirjen Usman Kansong berharap calon investor yang hadir dalam HUB.ID Summit 2023 dapat tertarik bekerja sama dan menanamkan investasi ke perusahaan *startup* di Indonesia.

"Sehingga mampu menciptakan peluang yang lebih tinggi bagi para perusahaan *startup* dalam negeri untuk mendapatkan investor skala global. Ajang ini juga memperkenalkan HUB.ID *Summit* kepada *Venture Capital* mancanegara agar dapat meningkatkan profil investasi bagi *startup* digital Indonesia," tutur Dirjen IKP Kementerian Kominfo.

Direktur Pemberdayaan Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Bonifasius Wahyu Pudjianto, menekankan arti penting penyampaian informasi mengenai ekosistem digital di Indonesia kepada para investor untuk menarik minat mereka berinvestasi.

"Kami mengharapkan dari presentasi yang disampaikan akan semakin banyak para investor, baik itu *private equity, venture capital*, ataupun mereka dari *philanthropic* untuk bisa masuk ke Indonesia," ujarnya dalam acara bertema "Indonesia Digital Transformation: How Kominfo Empower the Innovators" di Hannover Messe 2023, Hannover, Jerman, Kamis (20/04/2023).

"Semakin banyak para investor yang masuk ke Indonesia, mereka dapat melakukan kerjasama, baik itu sifatnya investasi, ataupun juga partnership dalam kegiatan usaha bersama para startup di Indonesia," ungkapnya.

Direktur Bonifasius Wahyu Pudjianto berharap bahwa investor yang masuk akan berkolaborasi dalam bentuk investasi atau kemitraan dengan para *startup* di Indonesia.

"Lewat kegiatan temu diskusi dengan para investor dan *startup* untuk lebih mengenal ekosistem digital di Indonesia, khususnya ekosistem *startup*. Sehingga dapat meningkatkan kerja sama antara investor dan *startup* di Indonesia," ungkapnya.





Bonifasius Wahyu Pudjianto berharap perusahaan *startup* ini dapat mengembangkan usahanya ke mancanegara.

"Kami mengharapkan mereka tidak hanya menguasai pasar Indonesia tetapi juga ke pasar mancanegara," ujarnya usai Seminar VC *Engagement* Eropa HUB.ID di Hannover, Jerman, Selasa (18/04/2023).

Chief Financial Officer Kecilin, Bisma Mandasamsu, menyatakan ada banyak program pemerintah dan BUMN untuk mendukung pengembangan startup di Indonesia.

"Pemerintah dan BUMN memiliki program inkubator dan akselerator. Kami bergabung dalam program inkubator sejak awal perusahaan kami berdiri," tuturnya.

Bisma mengapresiasi kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan produk dalam negeri sehingga memberikan nilai tambah kepada produk-produk *startup* asal Indonesia.

CEO dan Co-Founder Imajin, Chendy Jaya, mengapresiasi dukungan Kementerian Kominfo mendampingi dan memfasilitasi *startup* untuk ikut serta dalam Hannover Messe 2023. "Kominfo banyak sekali membantu kami, baik sebelum keberangkatan ke Hannover Messe sampai dengan pada saat perjalanan, dan juga support-supportnya selama di Hannover Messe," ujarnya.

Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga aktif memberikan eksposur, baik di dalam maupun luar negeri, untuk menghubungkan mereka dengan *stakeholders* yang tepat. Chendy menyatakan harapannya untuk bertemu dengan mitra strategis guna mengembangkan *startup* Imajin.

"Bersama dengan Kominfo, kami berharap untuk mendapatkan *strategic partner* dan juga dikenalkan dengan mitra bisnis maupun investor supaya dapat benefit di kemudian hari," ungkapnya.

Raih Investasi Lebih dari US\$ 1.9 Miliar

Pagelaran Hannover Messe 2023 berhasil membuat Indonesia mendapatkan komitmen investasi yang ditaksir lebih dari US\$1,9 miliar yang diproyeksikan dapat menciptakan 80.000 lapangan kerja.



"Perjanjian kerja sama ini merupakan capaian dari salah satu sasaran partisipasi Indonesia sebagai *Partner Country* Hannover Messe 2023, yaitu terwujudnya kerja sama industri dan penanaman modal asing," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keteranganya, Selasa (18/4/2023).

Setidaknya ada 27 perjanjian kerjasama yang ditandatangani Indonesia dalam pagelaran akbar ini. Perjanjian ini meliputi 1 kesepakatan kerja antara Pemerintah Indonesia dan Jerman atau Government to Government (G to G).

Adapun kesepakatan *G to G* yang ditandatangani adalah Pernyataan Kehendak Bersama (*Joint Statement Declaration of Intent/* JDoI) antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dengan Kementerian Federal Urusan Ekonomi dan Aksi Iklim (*Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action/*BMWK) Jerman tentang Kerja Sama Ekonomi Bersama (*Joint Economic Cooperation*).

Terdapat juga perjanjian kerja sama *Government* to *Business* (*G* to *B*) yang meliputi peningkatan sumber daya manusia dalam pembangunan dan transformasi industri 4.0, pengelolaan limbah

menjadi energi, pengelolaan limbah dengan menggunakan sirkuler ekonomi, serta kolaborasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kerja sama secara *Business to Business* (*B to B*) mencakup pengelolaan teknologi energi yang berkesinambungan, serta investasi tentang penggunaan energi solar, pengembangan semikonduktor, peralatan medis dan keamanan industri manufaktur.

Di samping itu, terdapat juga kerja sama tentang pengelolaan limbah menjadi energi, pendirian pusat pabrik kimia dan *molding*, pendirian pusat pembelajaran, kerja sama dalam ekosistem pengisian ulang kendaraan listrik (*electric vehicle*-EV) dan informasi digital industri 4.0.

"Selain itu, pengembangan Internet of Things (IoT), mesin Computerized Numerical Control (CNC) milling dan sistem pembelajaran tentang ventilator medis, solusi digital untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan servis secara digital, serta kerjasama pembuatan radar. Para pihaknya terdiri dari berbagai macam perusahaan swasta dan juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," menurut Agus.





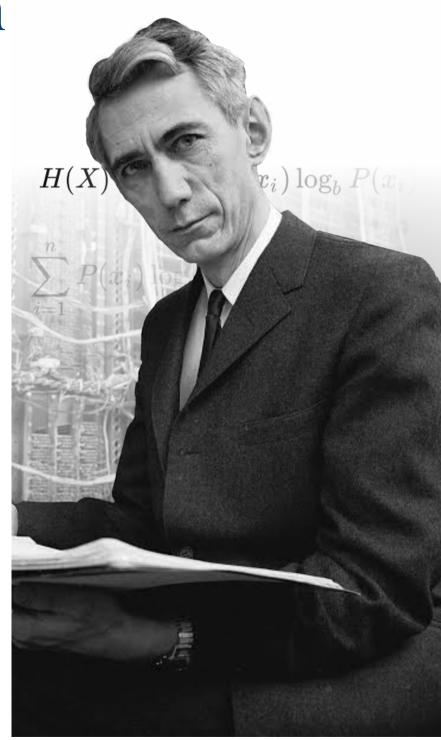
Claude Shannon

Bapak teori informasi

Bagi orang-orang yang berkecimpung dalam bidang matematika dan informasi, nama Claude Shannon barangkali sudah tidak asing lagi. Lahir di Michigan, 30 April 1916 dengan nama lengkap Claude Elwood Shannon, pria ini dikenal sebagai ahli matematika, insinyur listrik, sekaligus ilmuwan komputer yang meletakkan dasar untuk rangkaian digital, teori informasi, dan model komunikasi matematis.

Shannon menempuh pendidikan di University of Michigan dan lulus pada 1936 dengan gelar sarjana di bidang matematika dan teknik elektro. Tak lama berselang, ia mendapatkan posisi sebagai asisten peneliti di Massachusetts Institute of Technology (MIT) sambil menempuh pendidikan master. Selain itu, ia juga bekerja dengan peneliti populer Vannevar Bush dan membantunya membuat persamaan diferensial Bush.

Keikutsertaannya dalam program magang musim panas di American Telephone and Telegraph's Bell Laboratories di New York City pada 1937 mulai membangkitkan minat Shannon dalam bidang penelitian.





la memperoleh gelar master di bidang teknik elektro dan Ph.D. dalam bidang matematika dari MIT pada 1940. Tesis masternya yang berjudul *A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits* menggunakan aljabar Boolean untuk menetapkan landasan teoretis sirkuit digital dan menjadi dasar pengoperasian komputer dan peralatan telekomunikasi modern. Tesis itu pun kerap disebut sebagai salah satu tesis master paling signifikan di abad ke-20.

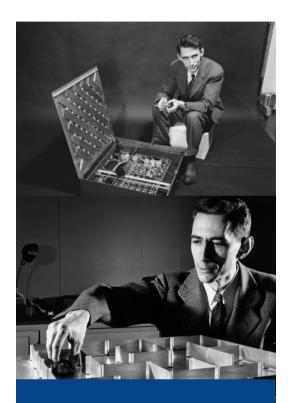
Tesis itu pun kerap disebut sebagai salah satu tesis master paling signifikan di abad ke-20

Setahun setelah kelulusannya dari MIT, pria yang mengidolakan Thomas Alva Edison ini bergabung dengan departemen matematika di Bell Labs dan memberikan kontribusinya untuk sistem kontrol rudal antipesawat.

Pada 1948, Shannon menerbitkan "A Mathematical Theory of Communication" yang disusun bersama para peneliti lain di Bell Labs, seperti Harry Nyquist dan R.V.L. Hartley. Hasil penelitian tersebut mendefinisikan gagasan matematis yang menyatakan bahwa informasi dapat diukur dan disampaikan melalui saluran komunikasi berupa telepon atau koneksi nirkabel.

Teori informasi tersebut rupanya memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan diyakini sebagai gagasan yang melampaui zaman. Shannon pun juga menerapkan teori informasi di bidang lain, seperti biologi, linguistik, psikologi, ekonomi, hingga fisika.

Berkat sumbangsih dan karya-karyanya, suami dari Betty Shannon ini mendapatkan banyak penghargaan bergengsi, seperti National Medal of Science (1966), Harvey Prize (1972), Kyoto Prize (1985), Shannon Award (1973) dan gelar kehormatan dari beberapa perguruan tinggi terbaik dunia.



Penghargaan

1966

National Medal of Science

1972

Harvey Prize

1985

Kyoto Prize

1973

Shannon Award

Dan gelar kehormatan dari beberapa perguruan tinggi terbaik dunia



Pengembangan Kecerdasan Artifisial

dalam Berbagai Aspek untuk Memperkuat Daya Saing Nasional



Artificial intelligence (AI) atau kecerdasan artifisial telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern hampir di seluruh dunia, tak terkecuali dengan Indonesia. Berbagai aspek dalam kegiatan sehari-hari pun tak bisa lepas dari teknologi tersebut, mulai dari aplikasi transportasi daring, belanja daring, media sosial, mobile banking, streaming musik atau film, hingga peralatan rumah tangga.



Di balik kecanggihan teknologi kecerdasan artifisial dan solusi yang diberikan, ada berbagai dampak yang muncul dan mengubah pola hidup masyarakat. Tak sedikit pula masalah yang ditimbulkan dalam berbagai aspek dan harus ditangani dengan serius.

Menanggapi fenomena tersebut, Pemerintah melalui Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) tengah menyiapkan Strategi Nasional (stranas) Kecerdasan Artifisial (KA) guna mempercepat penyelenggaraan KA untuk memperkuat daya saing nasional.

"BRIN sedang menyiapkan stranas KA, karena penguasaan KA ini tidak serta merta hanya dilakukan dengan mengembangkan teknologinya saja. Regulasi juga perlu diperhatikan guna memastikan perkembangan KA sesuai dengan strategi dan kepentingan nasional," terang Direktur Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi BRIN, Dudi Hidayat dalam Seminar Kebijakan dan Standar Kecerdasan Artifisial (KA) Bebasis Gender di Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada Selasa (28/02/2023).

Riset tersebut meneliti tentang kebijakan terhadap Kecerdasan Artifisial yang inklusif dan peka terhadap gender

Seminar yang digelar oleh Kementerian Kominfo (Kemkominfo) bersama International Telecommunication Union (ITU) ini merupakan salah satu luaran dari riset yang telah diselenggarakan oleh ITU dengan United Nations University (UNU) – Macau pada pertengahan tahun 2022 silam. Riset tersebut meneliti tentang kebijakan terhadap KA yang inklusif dan peka terhadap gender.

Direktur Dudi pun menambahkan bahwa pertumbuhan KA akan menjadi jauh lebih pesat di masa mendatang. Problematika dan dilema, seperti hilangnya berbagai mata pencaharian karena digantikan oleh KA, hingga kebutuhan data yang lebih besar yang pada akhirnya akan mengancam rentannya keamanan data pribadi, juga akan muncul bersamaan dengan peningkatan kecanggihannya.

Bias dalam Produk Kecerdasan Buatan Juga Sudah Harus Diperhatikan dan Diatur

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Tata Kelola Aptika, Teguh Arifiyadi mengatakan bahwa selama ini hanya kecanggihan dan fungsi dari KA yang dibahas dalam berbagai forum dan seminar, tetapi tidak dengan biasnya. Ia berharap stranas KA bisa meningkatkan awareness terkait hal ini.

"Kita hanya berbicara soal kecanggihan dan fungsi dari KA, tetapi tidak dengan adanya bias pada produk tersebut. Diharapkan stranas KA yang sedang disiapkan BRIN saat ini dapat mengatur kesadaran akan hal ini," jelas Plt. Direktur Teguh.

Produk-produk KA, lanjut Plt Direktur Teguh, memiliki bias yang cukup signifikan. la mencontohkan dalam asisten virtual Apple, Siri memiliki suara perempuan, begitu juga pada Windows, Cortana, dan Google Maps juga memiliki suara perempuan.

"Mengapa bukan suara laki-laki? Ini merupakan contoh bias yang mencolok, di mana suara perempuan dipilih karena terdengar bagus dan disukai orang-orang umum," tutur Plt. Direktur Teguh.

la juga menambahkan contoh bias lainnya, seperti dalam penggunaan mesin penerjemah.



Liputan Khusus

Contohnya saat menerjemahkan kata "Dia sedang memasak" mesin penerjemah akan mengartikannya menjadi *she is cooking*. Namun ketika menerjemahkan kata "Dia sedang bekerja" mesin penerjemah akan mengartikannya menjadi *he is working*.

"Bias-bias dalam teknologi ini mencerminkan bias dan stereotip yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karenanya, perlu diatur *ethics*nya juga," tegasnya.



Proyeksi Kontribusi Kecerdasan Artifisial untuk Perekonomian ASEAN 2030

Direktur Regional International Telecommunication Union (ITU) untuk Kantor Wilayah Asia dan Pasifik, Atsuko Okuda, mengatakan bahwa KA dapat berkontribusi sebanyak satu triliun dolar untuk perekonomian ASEAN pada tahun 2030. Pemerintah berbagai negara di Asia Tenggara mulai mengakui betapa pentingnya KA untuk perekonomian mereka.

"Singapura telah meluncurkan Stranas KA mereka di tahun 2019, yang disusul oleh Malaysia dan Indonesia di tahun 2020," tuturnya.

Kominfo Dukung Penerapan NLP untuk Perkuat Penanganan Konten Hoaks dan Enabler Ekonomi Digital

Selain bias stereotip dan gender yang muncul dalam perkembangan kecerdasan artifisial, banyaknya konten hoaks di berbagai platform media digital yang sering menimbulkan berbagai permasalahan di kalangan masyarakat juga harus diperhatikan. Sebab, hal tersebut banyak yang mengarah pada keresahan, perpecahan, hingga kriminalitas.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerja sama dengan Kolaborasi untuk Percepatan Inovasi Kecerdasan Artifisial Indonesia Badan Riset dan Inovasi Nasional (Korika BRIN) dalam penanganan konten hoaks di dunia digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan bahwa potensi kerja sama dalam penciptaan fitur teknologi kecerdasan artifisial dapat membantu Kementerian Kominfo menjalankan pengawasan atas berita hoaks.

"Lewat kerja sama ini, Kominfo dan Korika BRIN akan menciptakan teknologi kecerdasan artifisial untuk melakukan analisis berita hoaks dan sentimen," jelasnya usai Penandatanganan Kerja Sama Pengembangan Natural Language Processing Artificial Intelligence antara Ditjen Aptika dan Korika BRIN di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (13/04/2023).

Dirjen Semuel menjelaskan, Korika akan menghasilkan algoritma yang dibuat melalui teknik *Natural Language Processing* (NLP) dan *Machine Learning* kemudian akan diberikan kepada Kominfo untuk dapat dimanfaatkan dalam penanganan konten hoaks.





Kominfo dan
Korika BRIN akan
menciptakan
teknologi
kecerdasan
artifisial untuk
melakukan analisis
berita hoaks dan
sentimen

"Hasil yang diharapkan Kominfo dapat memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial dalam menjalankan fungsi pengawasan atas berita hoaks dan sentimen di sosial media," tegasnya.

Ketua Umum Korika, Prof. Dr. Ir. Hammam Riza, M.Sc.,IPU menyatakan kerja sama itu merupakan salah satu tindak lanjut penerapan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia (Stranas KA) yang diluncurkan pada Hari Kebangkitan Teknologi Nasional pada 10 Agustus 2020.

"Korika merupakan hasil pemikiran kolektif dan kolaboratif dari berbagai entitas yang melengkapi komponen *quad helix*, pemerintah, industri, akademis, dan komunitas untuk mengorkestrasi ekosistem kolaborasi dan menghasilkan inovasi," tuturnya.

Beliau menambahkaan bahwa kerja sama diformalkan ke dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) itu akan menjadi salah satu wujud nyata kolaborasi percepatan penerapan strategi nasional kecerdasan artifisial menuju Visi Indonesia 2045.

"Ini sejalan dengan pembentukan Korika yang merupakan gabungan pusat inovasi kecerdasan artifisial (PIKA) saat BPPT," tegasnya.



NLP-AI Juga Diterapkan sebagai Enabler Ekonomi Digital

Selain penanganan konten hoaks, pengembangan *Natural Language Processing Artificial Intelligence* (NLP-AI) juga menjadi salah satu metode untuk pengembangan ekosistem dan industri digital di Indonesia.

Dirjen Semuel mengatakan akan terus mengembangkan kecerdasan artifisial atau artificial intelegence agar bisa memajukan industri digital.

"Kami di pemerintah tugasnya adalah mendorong apa yang diinsiasi dari komunitas, karena (pengembangan NLP-AI) ini adalah bagian yang baik," jelasnya

Dirjen Semuel pun menambahkan bahwa peran pemerintah saat ini tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga memfasilitasi dan menjadi akselerator untuk pengembangan ekosistem digital nasional. Sehingga kemajuan teknologi digital, seperti NLP-Al, yang dimanfaatkan oleh berbagai pihak perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah.

"Jadi, Al dan NLP ini seharusnya dilihatnya sebagai enabler untuk kemajuan lebih tinggi lagi. Karena mungkin manusia sebagai analitiknya nanti, bukan lagi memori semuanya, umpanya dengan adanya Al," ujarnya.

Beliau pun memberikan salah satu conton keunggulan Al yang dimanfaatkan untuk menerjemahkan bahasa dari berbagai negara ke dalam Bahasa Indonesia atau sebaliknya.

"Misalnya saya lagi ngomong bahasa Indonesia tapi disana (pengguna lain) earphone-nya sudah ngomong dengan bahasa masing-masing. Jadi yang namanya language barrier itu akan terjadi, kita ke mana pun berani, itu mungkin ke depannya fokus kesini. Ini adalah suatu perubahan yang harus kita sikapi dan harus

kita antisipasi bahwa, kita mengimpor *knowledge*-nya boleh, teknologinya jangan, kita kembangkan sendiri," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Korika Hammam Riza menjelaskan NLP bukan menjadi hal yang baru melainkan sudah ada sejak awal diciptakannya teknologi Al.



kita antisipasi bahwa, kita mengimpor knowledge-nya boleh, teknologinya jangan, kita kembangkan sendiri," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Korika Hammam Riza menjelaskan NLP bukan menjadi hal yang baru melainkan sudah ada sejak awal diciptakannya teknologi Al.

"Saya masih ingat NLP adalah bagian dari pengalaman sekolah saya di S1, belajar tentang NLP. Kemudian saya masuk ke BPPT yang sekarang sudah terintegrasi dengan BRIN, itu juga kita bicara dengan NLP," jelasnya.

Menurutnya, NLP memiliki metode yang berbeda-beda dan tekniknya berubah, sama seperti mobil versi lama yang menggunakan *internal combine*, tetapi yang model terbaru mesinnya sudah menggunakan *electric vehicle* atau kendaraan listrik.

"Demikian juga untuk pemrosesan bahasa, dulu ada *rule based* kemudian ada *machine learning*, dan sekarang ada *generative Al.* Sehingga inilah yang harus kita kejar untuk bisa kita kuasai, karena kalau hanya dengan teknik-teknik NLP yang lama mungkin sebagian besar dari masyarakat *linguistic competitional* di Indonesia sudah memahami cara NLP," tandasnya.



Titik Terang dari Judicial Review

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)



Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) rupanya menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Hal ini terlihat dengan ada permohonan uji materi atau *judicial review* UU PDP terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan pada November 2022 lalu.



Dilansir dari laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ada dua pihak yang mengajukan *judicial review*, yakni Leonardo Siahaan dan Dian Leonaro Benny. Kedua laporan penggugat terdaftar dengan nomor 108/PUU-XX/2022 dan 110/PUU-XX/2022.

Pemohon Perkara Nomor 108/PUU-XX/2022 memiliki pendapat bahwa UU PDP belum memberikan payung hukum bagi pengguna data pribadi, khususnya bagi pelaku bisnis e-commerce berskala rumah tangga. Kondisi ini rentan terjadi kebocoran data, terutama saat transaksi finansial dilakukan oleh peretas dengan melakukan cyber crime economy atas insiden kebocoran data.

Pemohon juga berpandangan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mengakibatkan data pribadi seseorang mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik. Hal ini dianggap mengancam hak konstitusional subjek data pribadi. Perlindungan data pribadi seharusnya termasuk perlindungan HAM. Keberadaan UU PDP dianggap tidak menjawab perlindungan terhadap hak subjek data pribadi.

Menurut pemohon, privasi berkaitan dengan hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada hak lain, tetapi hak tersebut akan hilang apabila seseorang mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi pada masyarakat umum



Sementara Pemohon Perkara Nomor 110/PUU-XX/2022 berpendapat bahwa pasal yang diajukan untuk diuji dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Perlindungan data diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan privasi sebagai individu. Menurut pemohon, privasi berkaitan dengan hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada hak lain, tetapi hak tersebut akan hilang apabila seseorang mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi pada masyarakat umum.

Dalam pelanggaran privasi terdapat kerugian yang sulit untuk dinilai. Kerugian yang dialami dapat mengganggu kehidupan pribadi sehingga pihak korban wajib mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita tersebut. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU PDP tidak secara terang dan jelas menjelaskan secara pasti dan akurat mengenai yang dimaksud dengan 'kepentingan pertahanan dan keamanan nasional'. Sehingga pasal a quo berpotensi menjadi pasal yang multitafsir dan bermasalah di kemudian hari dan digunakan sebagai justifikasi untuk mengecualikan hak-hak subjek data pribadi.



Keterangan dari Kominfo Menjadi Salah Satu Acuan untuk Putusan MK

Dalam sidang keempat terkait Perkara Nomor 108/PUU-XX/2022 dan Perkara Nomor 110/PUU-XX/2022 pada Senin (13/04/23), pemerintah melalui Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel A. Pangerapan, pun memberikan keterangannya.

Dalil kerugian dari Pemohon Perkara 108/PUU-XX/2022 sesungguhnya telah terakomodir dalam Pasal 2 ayat (1) UU PDP yang mengatur bahwa norma tersebut berlaku untuk setiap orang.

Dirjen Semuel kemudian menyebutkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU PDP pada frasa "kegiatan pribadi" atau "kegiatan rumah tangga" memiliki esensi berupa kegiatan dalam ranah privat yang memiliki sifat personal, nonkomersial, dan nonprofesional. Pengecualiaan yang diatur dalam pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia khususnya menjaga hak privasi setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.



Dirjen Semuel mengatakan bahwa UU PDP mengatur orang-perorangan, termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau *e-commerce* di rumah, dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Sehingga ia bertanggung jawab secara hukum atas pemrosesan data pribadi yang diselenggarakannya dan memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PDP.

Dalil kerugian dari Pemohon Perkara 108/PUU-XX/2022 sesungguhnya telah terakomodir dalam Pasal 2 ayat (1) UU PDP yang mengatur bahwa norma tersebut berlaku untuk setiap orang.

orang-perorangan, termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau e-commerce di rumah, dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi





"Makna pengecualiaan dalam UU PDP terhadap perseorangan, yakni individu yang melakukan pemrosesan data pribadi sepanjang untuk kegiatan pribadi atau rumah tangga, tidak dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Dengan kata lain, individu tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban sebagai pengendali data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP tersebut," ujar Dirjen Semuel.

Sedangkan untuk dalil Pemohon Perkara Nomor 110/PUU-XX/2022, pemerintah berpendapat batasan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU PDP, yakni dalam rangka melaksanakan ketentuan undangundang. Sebab pengecualian yang dilakukan harus berada dalam koridor yang telah ditentukan undang-undang terkait pertahanan dan keamanan nasional.

Dirjen Semuel pun menegaskan bahwa UU PDP harus dipahami secara konteks sistem hukum yang terkait dengan perlindungan data pribadi. UU PDP dalam tatanan hukum merupakan undangundang yang bersifat khusus, sehingga adanya norma lain yang disebutkan dalam aturan pasal-pasalnya secara hukum harus merujuk pada ketentuan dalam undang-undang lain yang mengatur secara khusus, termasuk dalam perkara ini undang-undang yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan nasional.

"Justru dampak yang terjadi apabila permohonan Perkara 110/PUU-XX/2022 dikabulkan, maka akan mempersempit dan mengunci definisi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional dalam UU PDP dan berpotensi menimbulkan pertentangan dengan undang-undang lainnya yang memuat istilah pertahanan dan/atau keamanan nasional negara, di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara," urai Dirjen Semuel.





MK Menilai Keseluruhan Pasal yang Dimohonkan Tidak Bertentangan dengan Konstitusi Indonesia

Setelah melalui berbagai tahapan persidangan, hakim Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Ketua MK Anwar Usman tersebut akhirnya memberikan putusan terhadap dua permohonan uji materi atau *judicial review* Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada Jumat (14/04/2023).

MK menyatakan tidak sependapat dengan para pemohon dan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya serta menilai bahwa keseluruhan pasal yang dimohonkan tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel A. Pangerapan, pun mengapresiasi putusan tersebut. "Putusan Mahkamah Konstitusi ini sebagai penegasan UU PDP telah sesuai dengan UUD 1945," ujarnya saat ditemui di Jakarta Pusat, Sabtu (15/04/2023).

Dirjen Semuel juga mengapresiasi permohonan uji konstutusionalitas itu sebagai bentuk keterlibatan masyarakat. Menurutnya, hal tersebut berdampak positif terhadap penyiapan peraturan perundang-undangan organik yang sedang disusun pemerintah untuk melaksanakan UU PDP.

"Permohonan uji konstitusionalitas terhadap UU PDP merupakan bentuk peran dan keterlibatan masyarakat dalam membangun sistem pelindungan data pribadi yang konstitusional," ungkapnya.

Menurut Dirjen Semuel, pemerintah saat ini sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah untuk mengimplementasikan UU PDP.

"Sesuai amanat UU PDP, pemerintah sedang menyusun peraturan turunan berupa rancangan peraturan presiden terkait lembaga pelindungan data pribadi dan rancangan peraturan pemerintah terkait pelaksanaan UU PDP," tandasnya.



Umat muslim menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H yang jatuh pada Sabtu, 22 April 2023 dengan penuh sukacita. Bagaimana tidak, setelah tiga tahun "terkungkung" pandemi Covid-19 yang membatasi gerak, akhirnya tahun ini seluruh masyakarat Indonesia bisa mudik ke kampung halaman dengan leluasa.

Penghapusan PPKM membuat tempattempat umum, seperti destinasi wisata, stasiun, terminal, hingga pelabuhan di berbagai daerah menunjukkan geliat kebangkitan pascapandemi.

Perayaan Hari Raya Idul Fitri pun tak lepas dari beragam kegiatan yang sudah menjadi tradisi di berbagai daerah, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Lalu apa saja momen-momen spesial yang kini bisa dilakukan lagi pada Hari Raya Idul Fitri di tahun 2023?

Virtual Back to Offline Special Tradition



Warga Jakarta begitu khusyuk melakukan salat Idul Fitri di halaman Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Pelaksanaan salat Idul Fitri di tempat umum sudah diperbolehkan setelah tiga tahun sebelumnya masyarakat diimbau untuk melaksanakan ibadah sunah tersebut di rumah masing-masing.



Photo Story

Mudik menjadi tradisi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia menjelang perayaan Idul Fitri. Mudik 2023 ini pun menjadi momen yang paling dinanti pascapandemi.







Open house menjadi ajang silaturahmi dengan tetangga atau saudara lainnya yang sudah lama tidak berjumpa akibat pandemi. Tuan rumah menyajikan beragam makanan khas Lebaran yang bisa disantap oleh para tamu sambil bertukar kabar.



Idul Fitri di beberapa wilayah Indonesia selalu identik dengan ketupat, opor ayam, sayur labu siam, dan sambal ati kentang. Hal ini sebenarnya bukan tentang makanannya, tetapi dengan siapa menyantapnya.



Literasi Digital Bagi Kemajuan Bangsa



Dunia digital saat ini memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hadirnya teknologi dan internet telah membuka berbagai kesempatan baru bagi masyarakat untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi. Namun untuk dapat memanfaatkan peluang ini secara optimal dibutuhkan literasi digital yang baik. Sayangnya sampai saat ini masih banyak masyarakat, terutama masyarakat di desa, yang belum memiliki akses atau keterampilan dalam hal teknologi dan internet.

Dikutip dari buku Peran Literasi Digital di Masa Pandemik (2021) karya Devri Suherdi, literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya.

Terdapat empat prinsip dasar dari literasi digital:

01 Pemahaman

Artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media, baik secara implisit ataupun eksplisit.

02 Saling ketergantungan

Artinya antara media yang satu dengan lainnya saling bergantung dan berhubungan. Media yang ada harus saling berdampingan serta melengkapi antara satu sama lain.

03 Faktor sosial

Artinya media saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat. Karena keberhasilan jangka panjang media ditentukan oleh pembagi serta penerima informasi.

04 Kurasi

Artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Kurasi juga termasuk kemampuan bekerja sama untuk mencari, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang dinilai berguna.



Hasil Survei Indeks Literasi Digital Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Katadata Insight Center (KIC) Tahun 2022 menunjukkan kapasitas Literasi Digital masyarakat Indonesia berada di angka indeks 3.54 dari 5.00. Hal itu menunjukkan tingkat literasi digital di Indonesia masih berada dalam kategori "sedang".

Sehingga diperlukan adanya langkah percepatan untuk mendorong tingkat literasi digital di Indonesia baik bagi mereka yang masih berada pada tingkat pendidikan maupun masyarakat secara umum.

Sehingga diperlukan adanya langkah percepatan untuk mendorong tingkat literasi digital di Indonesia baik bagi mereka yang masih berada pada tingkat pendidikan maupun yang sudah dewasa.

Hal ini perlu dilakukan guna mendorong masyarakat terhindar dari segala jenis bentuk tindak kejahatan yang berkaitan dengan teknologi dan bisa lebih siap menghadapi era yang serba digital ke depan.

Peran Kominfo dalam peningkatan literasi digital

Peran Kominfo sebagai instansi pemerintah yang membidangi digital menjadi krusial, baik sebagai pengambil kebijakan dan sebagai tolak ukur baik bagi masyarakat terutama bagi instansi pemerintah lainnya.

Salah satu dari berbagai upaya strategis Kominfo adalah dengan menginisiasi Program Gerakan Literasi Digital Nasional dengan Tema "INDONESIA Makin Cakap Digital" yang menyasar pada tiga segmen, yaitu segmen pemerintahan, segmen pendidikan, dan segmen masyarakat umum. Program tersebut memiliki target 50 juta masyarakat Indonesia terliterasi sampai dengan tahun 2024.



tingkat literasi digital di Indonesia masih berada dalam kategori "sedang"

Tantangan

Tantangan terbesar dari literasi digital adalah arus informasi yang banyak, disusul dengan Konten negatif seperti pornografi, isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan lainnya. Artinya masyarakat terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan. Dalam hal inilah literasi digital berperan, yakni untuk mencari, menemukan, memilah, serta memahami informasi yang benar dan tepat.

Berbagai upaya untuk mengatasi tantangan ini harus dilakukan secara terus-menerus dan *up to date*, di mana perubahan dalam dunia teknologi berkembang sangat cepat. Seperti besarnya potensi bahaya dari *deep fake* yang saat ini banyak menjadi perbincangan.

Asa menuju Indonesia masa depan

Seiring meningkatnya kualitas literasi digital masyarakat Indonesia secara bertahap, serta didukung oleh terus bertambahnya infrastruktur media telekomunikasi di Indonesia, peluangpeluang terjadinya kejahatan dan misinformasi diharapkan dapat terus menurun sehingga tercipta ruang digital yang aman dan terkoneksi untuk percepatan peluang seperti peningkatan transaksi digital yang lebih tinggi.



3 Dekade Museum Penerangan

Kominfo Terus Lakukan Revitalisasi





Museum Penerangan telah memasuki usia 30 tahun sejak diresmikan pada tanggal 20 April 1993. Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Museum Penerangan yang ke-30, Museum Penerangan menggelar program publik dengan tajuk "Tumbuh Bersama, Bersinar Selamanya". Kegiatan ini dipersembahkan untuk seluruh pengunjung Museum Penerangan yang akrab disapa dengan sebutan "Muspeners".

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong menyatakan selama tiga dekade ini Kementerian Kominfo terus melakukan revitalisasi dan pembaruan agar Museum Penerangan menarik lebih banyak pengunjung.



"Tiga dekade ini menandai perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Museum Penerangan, pembaruan-pembaruan yang dilakukan oleh Museum Penerangan sejak 1993 sampai 2023," tuturnya usai menghadiri perayaan HUT ke-30 Museum Penerangan di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Sabtu (29/04/2023).

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (DJIKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Museum Penerangan memiliki fungsi sebagai Museum yang mengedukasi masyarakat dengan koleksi benda-benda komunikasi yang bersejarah dan sejarah layanan informasi dan komunikasi. Museum Penerangan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 April 1993 dengan mematrikan nama Penerangan yang menjadi saksi sejarah Kementerian bidang komunikasi yang menjadi 12 kementerian pertama pasca Indonesia Merdeka.

Pembukaan seremonial dibuka dengan pemukulan kentongan yang merupakan alat komunikasi tradisional dan menjadi ciri khas pembukaan seremonial kegiatan komunikasi.

Tema HUT

Tumbuh Bersama, Bersinar Selamanya





seluruh pemangku Pertemuan kepentingan Museum Penerangan dalam rangkaian kegiatan Sharing Session yang bertajuk "Museum Komunitas" dan dengan narasumber Maman Suherman selaku penulis, Bonnie Triyana selaku sejarawan dan pemimpin redaksi Historia.ID. Dimoderatori oleh Rian Timadar selaku Ketua Asosiasi Museum Indonesia Kawasan TMII.





Dalam rangka kegiatan 3 dekade ini Museum Penerangan menyelenggarakan berbagai rangkaian kegiatan seperti *Sharing Session* bersama siberkreasi, *Workshop* Edukasi *Cyanotype*, *Workshop* Kebugaran Jasmani Poundfit, dan Kerjasama dengan SMK Pariwisata Budi Agung Jakarta dalam pengimplementasian salah satu mata pelajaran yaitu MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*).







Sebagai wujud hiburan rakyat dan salah satu upaya Museum Peneragan untuk memasyarakatkan Museum, Museum Penerangan juga menghadirkan permainan tradisional khas Indonesia yang bisa diikuti oleh anak-anak dan remaja pengunjung TMII, kesempatan menggunakan teknologi VR untuk melihat sejarah media massa Indonesia, area festival jajanan kuliner dari UMKM Kominfo di Plaza Muspen, dan penampilan spesial dari Suara Kayu di Amphitheater Muspen.





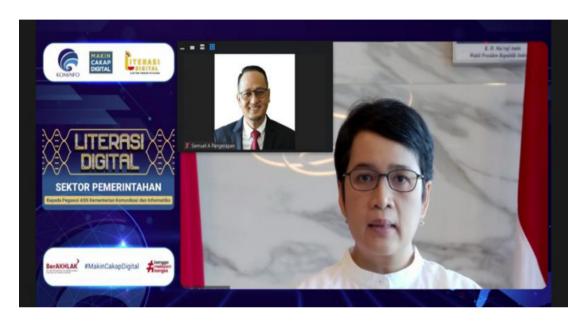
Tiga Dekade merupakan perjalan panjang dan cukup matang bagi Museum Penerangan untuk terus menjadi Museum yang terpercaya dan berpengalaman. Rekam Jejak Museum Penerangan yang dari tahun ke tahun mengalami perubahan dan peningkatan demi melayani masyarakat Indonesia.







Tingkatkan Literasi Digital Sektor Pemerintahan Lewat ASN Makin Cakap Digital



Hasil Survei Indeks Literasi Digital Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Katadata Insight Center (KIC) Tahun 2022 menunjukkan kapasitas Literasi Digital masyarakat Indonesia berada di angka indeks 3.54 dari 5.00. Hal itu menunjukkan tingkat literasi digital di Indonesia masih berada dalam kategori "sedang".

Guna meningkatkan literasi digital, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo telah melakukan berbagai upaya. Mulai dari Gerakan Nasional Literasi Digital hingga pelatihan literasi digital dasar, menengah dan lanjutan. Kementerian Kominfo juga menggelar Literasi Digital Sektor Pemerintahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel A. Pangerapan menyatakan ASN yang kini menjadi perhatian publik perlu memperhatikan jejak digital. Selain itu, dengan perkembangan teknologi *artificial intelligence* juga harus bisa mengenali informasi palsu atau *fake news*.

kapasitas Literasi Digital masyarakat Indonesia berada di angka indeks 3.54 dari 5.00

"Apa yang dilakukan di ruang digital benar-benar harus kita pikirkan, terutama sebelum mengunggah sesuatu ke media sosial. Kemudian teknologi Al, terutama mengenai risikonya seperti fake news, ASN Kominfo perlu membaca ini terutama agar memahami percakapan publik agar tidak salah dalam merespons isu yang ada," tandasnya dalam Acara Literasi Digital Sektor Pemerintahan kepada Pegawai ASN Kementerian Kominfo yang berlangsung secara hibrida dari ICE BSD, Tangerang Selatan, Senin (03/04/2023).



"Hal negatif yang ada di ruang digital harus dihadapi dengan baik, sebagai pelayan publik kita harus merespons ruang digital secara proaktif. Bukan hanya dengan bisa mengoperasikan komputer, namun kita harus mempunyai kecakapan digital sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru," ujarnya.

"Upaya peningkatan literasi digital selanjutnya adalah esensial dengan tujuan menciptakan ruang digital yang kondusif dan positif, oleh karena itu perlu adanya kerjasama antar komponen bangsa. Kemenkominfo sebagai regulator, komunikator, akselerator terus mengupayakan literasi digital untuk meningkatkan kompetensi ASN," tandasnya.

Kegiatan yang diikuti 68 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Kominfo itu, juga menghadirkan pembicara dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Puadi; Guru Besar dan Peneliti Bidang Rekayasa Perangkat Lunak Fasilkom Universitas Indonesia Eko Kuswardono; Inisiator Pemberdayaan Informatika Kabupaten Pemalang, Andri Johandri; Dosen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Haryatmoko; dan Dosen Universitas Bina Nusantara Bekasi, Cornelia Istiani.

Netralitas ASN dan Kultur Digital

Sebelumnya, dalam laporan kegiatan, Direktur Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika Kementerian Kominfo Boni Pudjianto menyatakan melalui ASN Makin Digital diharapkan dapat mendorong aparatur pemerintah menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam kehidupan digital. Lebih dari itu, ASN Kementerian Kominfo juga dapat fokus mendukung transformasi digital dengan cara memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.



Dalam sesi materi mengenai netralitas ASN, Perwakilan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, Puadi menekankan tiga penyebab ASN tidak menerapkan netralitas, yaitu kekerabatan dan kesukuan, kepentingan promosi jabatan dan tekanan tokoh.

Sekjen Mira Tayyiba menekankan agar ASN Kementerian Kominfo selalu menjaga netralitas, termasuk di ruang digital. Sebagai pelayan publik, menurutnya ASN perlu menjaga profesionalitas dengan salah satu tolok ukur layanan dan kepuasan publik di ruang fisik dan ruang digital.

Mengenai kultur digital ASN, Komisioner Pokja Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN, Arie Budhiman menyatakan digitalisasi menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja ASN.

Guru Besar dan Peneliti Bidang Rekayasa Perangkat Lunak Fasilkom Universitas Indonesia, Eko Kuswardono Budiarjo menjelaskan formula 4+1 dalam kecakapan digital, yaitu menyeleksi, memahami, menganalisis, dan memverifikasi. Formula itu bisa menjadi tolok ukur bagi ASN yang cakap digital.



Pemerintah dan DPR Sepakati Bahas Revisi Kedua UU ITE

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan kesiapan pemerintah untuk menindaklanjuti masukan dalam pembahasan.

"Dengan telah diberikannya pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI pembahasan mekanisme dan jadwal pembahasan serta pembahasan materi DIM RUU Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah siap untuk tindaklanjuti sampai dengan selesainya pembahasan revisi UU ITE ini dengan cepat," ungkapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2023).



Menteri Johnny menegaskan kesiapan pemerintah menindaklanjuti setiap masukan yang disampaikan anggota dewan. Melalui Keputusan Menkominfo Nomor 120 tahun 2023, Pemerintah telah membentuk Panja Pemerintah untuk pembahasan.

"Panja akan dipimpin oleh Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo dan Dirjen Peraturan Perundangan KemenkumHAM. Selama pembahasan juga turut melibatkan Tim Siber Polri," jelasnya. Menteri Johnny menjelaskan, revisi atas UU ITE akan dilakukan agar dapat menjamin kepastian ketertiban di ruang siber dengan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi secara umum.

"Kami telah mengadakan diskusi publik RUU ITE di bulan September dan Desember tahun 2022. Dari diskusi tersebut, terdapat masukan bahwa RUU ITE perlu menyertakan norma restorative justice. Usulan ini direncanakan dimuat dalam dua bagian UU ITE yakni keadilan restoratif berupa upaya penyelesaian tindak pidana yang merupakan delik aduan, dimana bagian penjelasan dimana bentuk aplikasi restorative justice yang dimaksud adalah penyelesaian di luar pengadilan," jelasnya.

"Kami telah mengadakan diskusi publik RUU ITE di bulan September dan Desember tahun 2022. Dari diskusi tersebut, terdapat masukan bahwa RUU ITE perlu menyertakan norma restorative justice. Usulan ini direncanakan dimuat dalam dua bagian UU ITE yakni keadilan restoratif berupa upaya penyelesaian tindak pidana yang merupakan delik aduan, dimana bagian penjelasan dimana bentuk aplikasi restorative justice yang dimaksud adalah penyelesaian di luar pengadilan," jelasnya.

Kesepakatan berlangsung setelah pandangan berbagai fraksi. Selanjutnya pembahasan materi yang lebih komprehensif dan kontekstual akan dilanjutkan dalam Masa Persidangan ke-5.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyatakan sudah ada sejumlah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang akan dibahas mendatang.

"Kami sampaikan bahwa jumlah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU sebanyak 38 DIM yang terdiri dari atas usulan yang bersifat tetap 7 DIM, usulan perubahan redaksional 7 DIM, dan usulan perubahan substansi 24 DIM. Selain itu, terdapat 16 DIM RUU usulan baru dari fraksi serta DIM Penjelasan sebanyak 26 DIM," tuturnya.



Antisipasi Lonjakan Arus Mudik, Kominfo - Opsel Pantau Layanan dan Siapkan Posko Telekomunikasi



Arus mudik lebaran tahun ini lalu lintas atau traffic layanan telekomunikasi diperkirakan meningkat mencapai 11% sampai dengan 36% dibanding tahun sebelumnya. Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail menyatakan telah melakukan koordinasi dengan penyelenggara layanan telekomunkasi seluler atau operator seluler untuk mengantisipasi peningkatan trafik layanan telekomunikasi selama arus mudik.

"Dengan lonjakan *traffic* arus mudik berarti akan sejalan dengan lonjakan traffic telekomunikasi, jadi dari dunia pertelekomunikasian dan seluruh *stakeholders* ini memang betul-betul harus mempersiapkan diri dengan baik akibat lonjakan arus mudik ini," ungkapnya dalam Podcast TokTok Kominfo Eps Mudik Lebaran 2023 yang ditayangkan dari Jakarta Pusat, Selasa (18/04/2023).

Menurut Dirjen Ismail, Kementerian Kominfo telah menerima laporan dari opsel yang beroperasi di Indonesia terkait dengan layanan yang disiapkan selama arus mudik, yakni memastikan *traffic* telekomunikasi dan pendirian posko layanan telekomunikasi. Kementerian Kominfo juga telah melakukan koordinasi dengan seluruh opsel untuk mengantisipasi cakupan wilayah atau coverage di lokasi-lokasi yang padat ketika arus mudik lebaran.





"Untuk tahun ini kita perkirakan lonjakan itu bisa mencapai angka 11% s.d. 36% dari normal, kalau di tahun-tahun sebelumnya bahkan sebelum Covid-19 kisaran di angka sekitar 10% s.d. 20%. Jadi perkiraan lonjakan trafik dari kondisi normal dan ini bukan angka yang kecil kalau 36%, berarti lebih dari seperempat dari kapasitas, maka kapasitas harus betul-betul ditingkatkan. Jadi semua operator besar telekomunikasi di Indonesia meningkatkan kapasitas dengan jumlah yang cukup fantastis," jelasnya.

Telkom Group

69 Posko

395.000 Gbps

Telkomsel

127 _{Posko} 12.590 _{Gbps}

Indosat

7.273 Gbps

XL Axiata

6.200 Gbps

Smartfren

400 Gbps

Plt. Dirjen PPI Kementerian Kominfo menjelaskan untuk Telkom Group telah menyiapkan kapasitas layanan telekomunikasi sebesar 395 ribu giga bytes per second (Gbps) dan 69 posko layanan telekomunikasi. Sedangkan untuk Telkomsel yang menangani layanan trafik internet di kisaran 12.590 Gbps dan 127 posko.

"Indosat juga akan mengantisipasi lonjakan ini sampai dengan kapasitas 7.273 Gbps dan akan menyiapkan posko nasional dengan model operasi digital, termasuk pemanfaatan *artificial intelligence* dan otomasi di berbagai posko yang disiapkan di Indosat," tuturnya.

Sementara untuk kapasitas yang disiapkan oleh XL Axiata dilaporkan mencapai 6.200 Gbps dengan seribu personil yang standby dalam rangka mengantisipasi arus mudik.

"Untuk Smartfren mereka akan menyiapkan sampai dengan 400 Gbps dengan empat posko mudik tersebar di seluruh Indonesia. Jadi, itu secara garis besar kalau kita lihat dari sisi kapasitas," ujarnya.

"Harus ada coverage baru terutama di daerah-daerah yang padatnya melonjaknya terbatas, misalnya di rest area seperti tol perlu disiapkan mobile combed BTS (Base Transceiver Station). Jadi bukan BTS yang stasioner yang sudah ada, tapi khusus untuk lonjakan di daerah-daerah yang melonjak secara sesaat kita perlu siapkan mobile combed termasuk daerah wisata, daerah rest area di tol, kemudian daerah-daerah pemberhentian kunjungan pusat-pusat transportasi mal dan sebagainya," jelasnya.



Triwulan Pertama 2023, Kominfo Identifikasi 425 Isu Hoaks

Selama triwulan pertama tahun 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengidentifikasi sebanyak 425 isu hoaks yang beredar di website dan platform digital. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan pada triwulan pertama tahun 2022 yang mencapai 393 isu hoaks

Pada Januari 2023 Tim AIS Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo mengenali 147 isu hoaks. Pada Februari 2023 terdapat 117 isu hoaks dan bulan Maret 2023 terdapat 161 isu hoaks.

Tim AIS dibentuk pada Januari 2018 untuk melakukan pengaisan, identifikasi verifikasi dan validasi terhadap seluruh konten hoaks yang beredar ruang digital. Tim AIS didukung oleh mesin AIS yang bekerja 24 jam, 7 hari seminggu tanpa henti.

Total sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan 31 Maret 2023, Tim AIS Kementerian Kominfo sebanyak 11.357 isu hoaks.

Isu hoaks dikenali 3 bulan terakhir

Januari

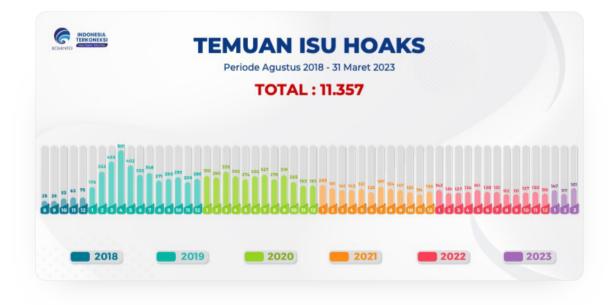
147 isu

Februari

117 isu

Maret

161 isu





Berdasarkan kategori, isu hoaks paling banyak berkaitan dengan kesehatan. Tim AIS Kementerian Kominfo menemukan sebanyak 2.256 isu hoaks dalam kategori kesehatan. Meskipun transisi ke endemi sedang berlangsung, ternyata masih banyak beredar isu hoaks yang berkaitan dengan Covid-19 baik mengenai virus maupun vaksinasi. Selain itu ada banyak informasi yang menyesatkan terutama berkaitan dengan khasiat tanaman atau obat dan produk kesehatan.



Isu hoaks yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah juga tercatat paling banyak ditemukan. Secara kumulatif, sejak Agustus 2018, Tim AIS Kementerian Kominfo menemukenali 2.075 isu hoaks dalam kategori pemerintahan. Paling banyak merujuk pada akun palsu pejabat pemerintah pusat dan daerah. Selain itu ada beberapa informasi menyesatkan mengenai kebijakan pemerintah terkini.

Sementara itu pada urutan ketiga tertinggi temuan isu hoaks, ada kategori penipuan. Tim AIS Kementerian Kominfo mengidentifikasi sebanyak 1.823 isu hoaks. Konten ini didominasi oleh tautan pishing dan penipuan serta penipuan dengan menggunakan nomor ponsel.

Kementerian Kominfo telah melakukan publikasi berupa klarifikasi atas isu hoaks yang beredar itu. Selain itu, Kementerian Kominfo melakukan pemutusan akses atas konten yang teridentifikasi sebagai isu hoaks.

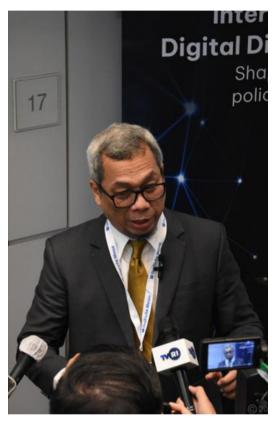
Pemutusan akses ditujukan agar konten hoaks tidak tersebar luas dan merugikan masyarakat.

Kominfo telah melakukan publikasi berupa klarifikasi atas isu hoaks yang beredar

Kementerian Kominfo juga mengimbau masyarakat untuk selalu cermat dan waspada atas peredaran isu hoaks. Dan tidak menyebarluaskan konten yang berisi hoaks melalui platform apapun.



Indonesia dan Jerman Tindak Lanjuti Kerja Sama Bidang Transformasi Digital



Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan *Bundesministerium für Digitales und Verkehr* (BMDV – Kementerian Digital dan Transportasi) Jerman menyelenggarakan pertemuan *Indonesian-German Digital Dialogue* (IGDD).

Pertemuan itu merupakan salah satu tindak lanjut Joint Declaration of Intent (JDoI) atau perjanjian kerja sama kedua negara di bidang transformasi digital.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong menyatakan dalam pertemuan pertama IGDD kedua pihak melakukan pertukaran informasi dan diskusi tentang perkembangan kebijakan digital untuk dituangkan dalam *Work Plan.*

"JDol memuat kesepakatan kerja sama di bidang digital policy and strategy, data policies, internet governance processes and policies, digital technologies, sustainable digital transformation, dan digital inclusion. Work Plan ini untuk menentukan prioritas dan tujuan Kementerian Kominfo dan BMDV di tahun 2023 dan 2024," ujarnya usai pertemuan IDGG yang berlangsung di Hannover Convention Center, Hannover, Jerman, Rabu (18/04/2023).

Pertemuan pertama IGDD membahas tema "Objectives and Priorities of the Indonesian—German Digital Dialogue" yang meliputi Digital Policies and Strategy, Digital Emerging Technologies, dan Digital Business Opportunities and Models.

Dirjen IKP Kementerian Kominfo menjelaskan peran pemerintah dalam implementasi kesepakatan tersebut adalah melalui kebijakan dan regulasi. Guna mengimplementasikan kesepakatan tersebut secara konkret, delegasi Indonesia yang dipimpinnya juga menghadirkan perwakilan industri.

Menurut Dirjen Usman Kansong, setiap negara memiliki perbedaan kondisi yang menyebabkan terjadinya perbedaan aturan yang diterapkan di negara masing-masing. "Kita tentu saja bisa menerapkan sesuatu yang sudah diterapkan di negara lain, tetapi cocok enggak diimplementasikan di negara kita, tetapi kita bisa melakukan harmonisasi," tandasnya.

Dalam pertemuan ini, Delegasi Republik Indonesia dipimpin Dirjen IKP Kementerian Usman Kansong, sementara delegasi Jerman dipimpin *Director General Digital and Data Policy* Benjamin Brake.



Tingkatkan Penanganan Hoaks, Kominfo dan KORIKA Tanda Tangani PKS



Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA) untuk mengembangkan *Natural Language Processing* (NLP) sebagai upaya meningkatkan penanganan hoaks. Kecerdasan buatan ini akan digunakan untuk melakukan analisa hoaks dan sentimen publik.

"Inti dari PKS yang ditandatangani Ditjen Aptika dan KORIKA ini kita akan membuat algoritma yang dibuat melalui teknik natural language processing dan machine learning. Kedua hal tersebut diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan atas hoaks dan sentimen termasuk yang ada di media sosial," ujar Direktur Jenderal Aptika, Semuel Abrijani Pangerapan saat konferensi pers Kerja Sama Pengembangan Natural Language Processing Artificial Intelligence antara Ditjen Aptika dan KORIKA BRIN di Kantor Kemkominfo, Jakarta, Kamis (13/04/2023).

Dirjen Semuel mengatakan, Ditjen Aptika memiliki data-data hasil analisa percakapan yang bisa digunakan untuk mengembangkan NLP. Menurutnya, data tersebut bisa dimanfaatkan oleh KORIKA menjadi sebuah big data untuk memperkaya *machine learning* dari teknologi tersebut.

"Data-data ini bisa jadi *basic* untuk nantinya kita bisa mengembangkan banyak hal," tambah Dirjen Semuel.



Sementara itu, Ketua Umum KORIKA, Hammam Riza mengatakan NLP sendiri bukan hal baru dan sudah ada sejak awal perkembangan kecerdasan buatan. Namun metode dan teknisnya berubah seiring dengan perkembangan teknologi.

Hammam menjelaskan, kerja sama ini akan menjadi kolaborasi yang berkelanjutan. "Untuk tahun ini ada beberapa target yang akan kita capai dengan melakukan data collecting, lalu data scrapping dan kemudian melihat kebutuhan daripada aplikasi yang akan dibangun," jelasnya.





Balmon Makassar Amankan Frekuensi Kunjungan Kerja Presiden RI



Tim Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar (Balmon Makassar) telah melaksanakan kegiatan dukungan pengamanan frekuensi radio dalam rangka kunjungan kerja Presiden RI berserta Ibu Negara Hj. Riana Joko Widodo di Provinsi Sulawesi Selatan pada 29 - 30 Maret 2023.

Pengamanan frekuensi radio dilakukan oleh Tim Balmon Makassar dengan didampingi Tim Hubdan XIV Hasanuddin sejak hari pertama Presiden RI tiba di Makassar dengan agenda kegiatan yang berlangsung di Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Luwu Timur.

Mengawali kunjungannya, sesaat setelah mendarat di bandara Internasional Sultan Hasanuddin Presiden RI beserta rombongan menuju Pasar Tramo di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Untuk kemudian menyerahan Bantuan Modal Kerja (BMK) kepada para pedagang kaki lima dan bantuan tunai langsung (BTL) kepada Pedagang Pasar.

Kunjungan dilanjutkan menuju Depo Kereta Api di Desa Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros dengan melakukan peninjauan fasilitas Depo Kereta Api dipandu Dirjen Perkeretapian, Mohamad Rizal Wasal, dilanjutkan peresmian Depo Kereta Api Maros serta pengoperasian jalur kereta api lintas Kota Makassar ke Kota Pare-Pare dan lintas Kabupaten Maros - Kabupaten Barru. Peresmian diawali sambutan selamat datang Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman dan laporan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Mengakhiri kunjungan kerja di hari pertama Presiden menyerahkan Bantuan Modal Kerja (BMK) kepada para pedagang kaki lima, dan Bantuan Tunai Langsung (BTL) kepada para pedagang pasar Pasar Terong di Kota Makassar.

Di hari hari kedua, Presiden Jokowi meninjau secara langsung pelaksanaan Panen Raya di Desa Baji Pamai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretaris Kabinet, Menteri Pertanian, Menteri Investasi, Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati Maros. Dilanjutkan kunjungan menuju lokasi gudang Bulog Batangase di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros untuk mengecek ketersediaan pangan di gudang Bulog. Peninjauan dipandu oleh Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), Budi Waseso.



Kolaborasi dengan Kemenkes, Kominfo Dorong Pemanfaatan RME di Jawa Timur



Kementerian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika terus mendorong digitalisasi sektor kesehatan melalui implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) di fasilitas kesehatan, salah satunya di Jawa Timur. Hal ini dilakukan dengan berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Asosiasi Healthtech Indonesia (AHI).

"Kami terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan selaku *leading sector* sektor kesehatan, serta Asosiasi Healthtech Indonesia dalam fasilitasi pemanfaatan teknologi Rekam Medis Elektronik, khususnya dalam mendukung Peraturan Menteri Kesehatan No.24 Tahun 2022," ujar Direktur Ekonomi Digital, I Nyoman Adhiarna dalam sambutannya pada Seminar Peningkatan Kompetensi Tenaga Informatika Kesehatan dalam Implementasi RME dan Integrasi SATUSEHAT sesuai Standar HL7–FHIR dan Peluncuran *AHI Academy*, Surabaya, Jumat (14/04/2023).

Menurut Direktur Nyoman, implementasi RME memerlukan dukungan dan keterlibatan aktif seluruh pihak yang terkait, seperti pemangku kebijakan, manajemen/pengelola fasilitas kesehatan serta kesiapan infrastruktur fasilitas kesehatan.

Sementara itu, Head of Health Innovation Ecosystem Digital Transformation Office (DTO) Kementerian Kesehatan, Patota Tambunan mengatakan platform SATUSEHAT berkomitmen untuk menggunakan standar yang sama, baik arsitektur, metadata dan terminologi saat melakukan pertukaran RME.

Sekitar 60 ribu fasilitas kesehatan akan terhubung dengan SATUSEHAT menggunakan HL7 FHIR sebagai standar interoperabilitas data, sehingga tidak ada ambiguitas di dalamnya.

"Platform ini juga akan membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan kesehatan berbasis data. Masyarakat bisa mengakses SATUSEHAT mobile yang dapat berfungsi sebagai personal health record (rekam medis pribadi)," tambahnya.

la pun juga mengakui, peningkatan kompetensi tenaga informatika kesehatan memang memerlukan dukungan dari seluruh ekosistem pelaku kesehatan. "Jadi bukan hanya Kementerian Kesehatan dan Kominfo, tapi kolaborasi dari seluruh ekosistem pelaku industri kesehatan, seperti Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Jawa Timur, Asosiasi Healthtech Indonesia (AHI) dan lembaga terkait lainnya," sebutnya.



Pelatihan Digital Talent Scholarship VSGA di Kabupaten Toba 2023



Pelaksanaan Program Digital Talent Scholarship dengan tema "Vocational School Graduate Academy" (VSGA) Kabupaten Toba 2023 secara resmi digelar di Kampus IT Del Laguboti pada tanggal 11 – 15 April 2023. Skema pelatihan VSGA terdiri dari Video Editor, Junior Network Administrator dan Operator Komputer Madya.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Toba Bapak diwakili oleh Sesmon Toberius Butarbutar, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba.

Dilanjutkan dengan sambutan Kepala BBPSDMP Kominfo Medan yang diwakilkan oleh Jarudo Damanik S.Kom. Kemudian kata sambutan dari Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, S.T., M.InfoTech selaku Rektor Institut Teknologi Del.

Balmon Mataram Edukasikan Keselamatan Pelayaran

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) berikan edukasi terkait keselamatan pelayaran kepada nelayan di Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur.

"Diharapkan dengan adanya kegiatan ini memberikan wawasan kepada para nelayan serta ilmu terkait penggunaan komunikasi dikapal agar tidak terjadinya gangguan saat melakukan komunikasi" ucap Direktur Operasi Sumber Daya Dwi Handoko, Selasa (18/4/2023).

Kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Operator Radio (SOR) Long Range Certificate (LRC) diperuntukan untuk seluruh Nelayan yang diselenggarakan di Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.





ASN Kominfo Diharapkan Jadi Teladan dalam Transformasi Digital



Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kominfo (Kemkominfo) sebagai instansi pemerintah yang membidangi bidang digital diharapkan dapat menjadi teladan bagi aparatur pemerintahan lainnya. Khususnya dalam penerapan transformasi digital nasional.

"Kita sebagai instansi pemerintah yang membidangi digital sudah seharusnya dapat menjadi contoh dan teladan bagi aparatur pemerintah lainnya dalam transformasi digital. Bagaimana kita menciptakan ruang digital yang kondusif dan nilai demokrasi bisa kita jaga kualitasnya," terang Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel A. Pangerapan, saat membuka acara Literasi Digital Sektor Pemerintahan bagi Sivitas Kemkominfo di Jakarta, pada Selasa (04/04/2023).

Dirjen Semuel menjelaskan di era keterbukaan informasi, ASN tentunya menjadi sorotan masyarakat. Semua kegiatan dan tindak tanduk ASN di media sosial akan mendapat perhatian khusus oleh masyarakat.

"Oleh sebab itu kita perlu memahami untuk bagaimana kita menyikapi hidup di tengah situasi yang demikian. Setiap yang kita lakukan di ruang digital meninggalkan jejak, jadi harus kita perhatikan benar sebelum melakukan posting," imbaunya.

Fenomena lainnya menurut Dirjen Semuel yang terjadi yakni terkait kemajuan teknologi turut memunculkan *deep fake*. Hal tersebut menurutnya perlu disikapi secara bijak. Kemajuan teknologi dapat membuat sesuatu yang *fake* bisa terlihat seperti asli.

instansi pemerintah yang membidangi digital sudah seharusnya dapat menjadi contoh dan teladan bagi aparatur pemerintah lainnya

"Ini pentingnya kita menguasai literasi digital agar bisa memilah dan tidak termakan isu hoaks yang semakin canggih. Kemajuan teknologi dibarengi tsunami informasi membuat ASN Kominfo dituntut harus bisa memilah dan memilih informasi," tegas Dirjen Semuel.



Balmon Banda Aceh Serahkan ISR kepada Nelayan



Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh kembali serahkan Izin Stasiun Radio (ISR) Kapal Nelayan. Penyerahan ISR dilakukan Kepala Balmon Banda Aceh, Lutfi kepada pemilik KM. Dua Putra Kita Malaka, Dhiyaul Farhan Muhammad Nur, dari Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, Jumat (14/04/2023). Di tempat sama dilangsungkannya Bimbingan Teknis Long Range Certificate (LRC) tepatnya di ruang aula kantor Panglima Laot Lhok Krueng Aceh/Loket Maritime On The Spot (MOTS) Kutaraja, Lampulo Kota Banda Aceh.

"ISR kapal nelayan ini merupakan yang pertama untuk wilayah pesisir pantai barat Aceh. Kami sangat mengapresiasi para nelayan dari Tapak Tuan (Kab. Aceh Selatan) yang telah menempuh perjalanan darat sekitar sembilan jam dengan jarak tempuh sekitar 434 Km, terlebih dengan menggunakan biaya sendiri untuk dapat hadir di Banda Aceh guna mengurus ISR kapal serta mengikuti Bimtek LRC dan Izin Komunikasi Radio Nelayan (IKRAN)", ujar Lutfi.





BPSDMP Kominfo Manado Berikan Pelatihan TIK Bagi Kalangan Disabilitas Tuna Netra Kota Manado

Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP Kominfo) Manado gelar program pengenalan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bagi Kalangan Disabilitas Angkatan Pertama.

Kegiatan dilangsungkan di Lt.1 Ruang Galeri Internet BPSDMP Kominfo Manado diikuti oleh 21 peserta dari kalangan difabel tuna netra se Kota Manado. Membuka secara resmi dalam sambutannya Plt Kepala BPSDMP Kominfo Manado mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu program Kementerian Kominfo dalam meningkatkan kualitas SDM digital masyarakat Indonesia khususnya kalangan disabilitas, sehingga kalangan difabel juga memiliki kesempatan dan daya saing yang sama di era digitalisasi.





Kamu Ikuti, Kamu Terinformasi

Ikuti Sosial Media Kominfo

@ @Kemenkominfo

@kemkominfo

@kemkominfo

Program Menarik Kominfo

Miss Lambe Hoaks VS Fact Boy

TokTok Kominfo

Kominfopedia

Netizen Bertanya Kominfo Menjawab

Kominfo News

